

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLRI
PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
DI POLRES SIDOARJO**

THESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Administrasi
Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Publik



Diajukan oleh :

HARISON HARMAINI St. RAJOMUDO

NIM : 72.930.0085

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
1995**

THESIS

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLRI PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DI POLRES SIDOARJO

Diajukan Oleh :

HARISON HARMAINI St. RAJOMUDO

NIM : 72.930.0085

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Thesis
Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
pada tanggal, 1995

Team Penguji

Ketua : Prof. Drs. H.M. Soempono Djojowadono



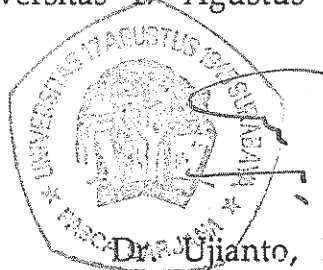
Anggota : 1. Dr. Ujianto, MS.



2. Drs. Ali Mudji, MS.



Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Ujianto, MS.



1. Rasakan manis pahitnya empedu,
Rasakan nikmat manisnya madu.

2. Kebahagiaan hanya akan datang dari :
Pengorbanan yang tidak sia-sia.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberi berkat dan rahmatNya, thesis ini berjudul "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Implementasi Kebijakan Polri pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Polres Sidoarjo" telah penulis selesaikan.

Thesis ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh derajat akademis Sarjana S-2 "Magister Sains" dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, dengan konsentrasi Administtrasi dan Kebijakan Publik, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana UNTAG Surabaya.

Dalam penulisan thesis ini, penulis telah berusaha menyusun dengan sebaik mungkin, namun bak pribahasa mengatakan bahwa "Tiada gading yang tak retak", oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penulisan ini masih banyak kekurangan disana-sini, karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, sehingga membutuhkan kritikan-kritikan yang bermanfaat dari pemerhati sekalian,

dalam rangka pengembangan Ilmu Kebijakan Publik, yang dikonversikan terhadap Kebijakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Selama proses perkuliahan sampai selesainya thesis ini, penulis banyak menemukan aral melintang yang tak patah dibawa lalu dan aral terbujur yang tak dapat dibawa hanyut, dan terkadang terasa bagaikan ingin memeluk gunung, tapi apakan daya, tangan sampai gunungnya yang meletus. Dan untuk melalui semuanya penulis banyak dibantu oleh berbagai fihak baik dalam bentuk moril maupun materiil. Sehingga dalam kesempatan ini sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Suwardi sekeluarga pemilik "R.M.Pandeka" di Pekanbaru, yang telah memberikan dukungan, sehingga memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Ilmu Administrasi ini.
2. Bapak Letkol Pol. Drs. E. Winarto Hadiwasito, MSi., selaku senior alumnus AKABRI dan rekan kuliah serta rekan dalam kelompok diskusi di Program Pasca Sarjana UNTAG Surabaya, yang selalu membantu penulis

baik moril maupun material sehingga penulis berhasil menyelesaikan program studi ini.

3. Bapak Prof. Drs. H. M. Soempono Djojowadono, sebagai dosen dan pembimbing I dalam penulisan thesis ini, telah berkenan meluangkan waktu untuk memeriksa dan mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan thesis ini. Disamping itu Bapak Drs. Ali Mudji, MS., sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan pembinaan.
4. Bapak/Ibu civitas akademika, beserta staf pengajar Program Pasca Sarjana, yang telah memberikan bahan serta masukan ilmu sehingga dapat menambah bobot ilmiah thesis ini.
5. Bapak Mayor Jendral Polisi Drs. Roesmanhadi selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang telah banyak memberi kesempatan kepada penulis beserta dorongan moril sehingga dapat diselesaikannya seluruh program yang ada.
6. Bapak Kolonel Polisi Drs. H. Endi Sukarno, selaku Kepala Kepolisian Wilayah Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat diselesaikannya thesis ini.

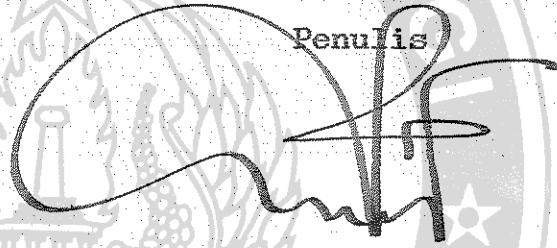
7. Bapak Letnan Kolonel Polisi Drs. H. Soeharto, selaku Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo, yang telah memberikan fasilitas obyek penelitian, dalam bentuk data-data atau dokumen yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan thesis ini.
8. Para senior, rekan dan junior alumnus AKABRI, yang banyak memberikan bantuan kepada penulis, dimana dengan bantuan tersebut telah dapat mengurangi beban penulis selama menjalani proses pendidikan.
9. Para pembina, pelatih dan pengasuh serta senior yang menggembleng penulis saat di AKABRI (Yon Diviacita) dan PTIK (Yon Widya Kerta Karma), sehingga dengan modal dasar intelek, mental dan fisik serta semangat juang yang ditanamkan telah mengantarkan penulis hadir di program Pasca Sarjana hingga selesai.
10. Istri penulis "Febri Akhriani" dan ketiga putri penulis "Puti Salihatin Fitri, Naila Andam Sari dan Puti Sarah Annisa" tercinta yang selalu setia mendampingi, yang telah ikut terabaikan selama proses pendidikan.
11. Dan masih banyak lagi yang lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu disini, yang telah ikut memberikan dorongan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi amalan beliau semua.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap mudah mudahan thesis ini berguna bagi para pembaca.

Surabaya, 20 Mei 1995

Penulis



HARISON HARMAINI St. RAJOMUDO

N.I.M : 72 . 930 . 0085

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
M O T T O	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
A B S T R A K	xiv
A B S T R A C T	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1 - 19
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Perumusan masalah ..	9
C. Tujuan dan Menfaat Penelitian	14
D. Sistematika	15
BAB II. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS	20 - 44
A. Latar Belakang Kebijakan	20
B. Isi dan Tujuan Kebijakan	22

C.	Implementasi Kebijakan Polri pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Polres Sidoarjo	24
D.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Implementasi Kebijakan Polri pada Proses Penyidikan Perkara Pidana	27
E.	H i p o t e s i s	42
BAB III.	METODE PENELITIAN	45 - 60
A.	Pemilihan Metode	45
B.	Pemilihan Sampel	46
C.	Instrumen Penelitian	49
D.	Teknik Analisa Data	51
E.	Batasan Variabel	53
BAB IV.	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	61 - 82
A.	Penyajian dan interpretasi	61
B.	Uji Hipotesis dan Interpretasi	65
C.	Korelasi Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung	73
D.	Kontribusi Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung	76

BAB V. PENUTUP	83 - 90
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	86
KEPUSTAKAAN	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94 -116



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Penduduk Kabupaten Daerah Tk. II Sidoarjo	3
Tabel 2. Crime Total dan Crime Index Polres SDA ..	4
Tabel 3. Keadaan Personil berdasarkan Kepangkatan Polres Sidoarjo	5
Tabel 4. Trend Perkembangan Kriminalitas Polwil Surabaya	47
Tabel 5. Jumlah Responden	48
Tabel 6. Kondisi Respon terhadap Variabel	62
Tabel 7. Regresi Ganda Variabel Bebas dan Variabel Tergantung	66
Tabel 8. Crime Trend Polres Sidoarjo	69
Tabel 9. Crime Clearance Trend	71
Tabel 10. Crime Clearance	72
Tabel 11. Korelasi masing-masing Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung	74
Tabel 12. Kontribusi Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Jumlah Nilai Responden	94
2. Hasil perhitungan Statistik	97
3. Struktur Organisasi Polres Sidoarjo	104
4. Struktur Organisasi Satuan Reserse Polres Sidoarjo	105
5. Struktur Organisasi Polsek/ta	106
6. Daftar Pertanyaan untuk Anggota Maeyarakat ...	107



ABSTRAK

Sebagai wilayah pengembangan industri dan wilayah penyangga kota Surabaya, wilayah kabupaten Sidoarjo berkembang dengan pesat, dengan ditandai oleh berkembangnya tingkat kehidupan masyarakatnya, dan semakin heterogennya penduduk dengan berbagai macam usahanya dalam mencapai dan memenuhi kesejahteraannya. Sebagai dampak dari perkembangan tersebut, diikuti pula oleh semakin berkembangnya kriminalitas dengan semakin tinggi, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitasnya, sehingga rasa aman bagi masyarakat Sidoarjo, semakin menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, yang sejajar dengan kebutuhan untuk kelangsungan hidup lainnya.

Polres Sidoarjo sebagai alat negara penegak hukum, penjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya dan sebagai pengayom, pembimbing, dan pelindung masyarakat Sidoarjo, bertanggungjawab untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakatnya, agar kelangsungan hidup dan pembangunan tetap berjalan dan berkembang sebagaimana yang telah direncanakan dan dikehendaki.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman tersebut, Polri telah mengeluarkan kebijakan dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, dan Polres Sidoarjo salah satu subsistem dari pada pelaksana kebijakan tersebut. Dan kebijakan tentang peningkatan pelayanan dalam proses penyidikan perkara pidana di wilayah hukum Sidoarjo, dilaksanakan oleh jajaran satuan fungsi Reserse.

Menurut Koontz (1988) dan Winardi (1987), bahwa diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan, setelah dikonverikan terhadap organisasi/satuan fungsi reserse Polres Sidoarjo ada 5 (lima) faktor yaitu sebagai berikut :

- a. Kemampuan anggota reserse.
- b. Dukungan biaya penyidikan perkara pidana.
- c. Prosedur penyidikan perkara pidana.
- d. Dukungan peralatan fungsi teknis reserse.
- e. Efektifitas komunikasi eksternal Polri.

Faktor-faktor tersebut lazimnya disebut sebagai faktor-faktor kemampuan operasional, setelah diadakan penelitian di wilayah hukum Polres Sidoarjo tentang korelasi dan kontribusi faktor kemampuan operasional fungsi reserse terhadap efektifitas implementasi kebijakan Polri tersebut, dan dihitung dengan teknik pengolahan statistik dengan menggunakan komputer program SPSS/PC⁺,

maka didapatkan hasil bahwa korelasinya Cukup Tinggi, akan tetapi kontribusinya Agak Rendah.

Agar terwujud rasa aman pada setiap pribadi masyarakat Sidoarjo sesuai dengan hakekat tujuan tugas pokok Polres Sidoarjo, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, maka diperlukan intervensi pihak yang mempunyai otorita kewenangan dengan prioritas pembangunan bidang kemampuan operasional fungsi reserse Polres Sidoarjo.



ABSTRACT

Sidoarjo, as an expanding industrial and supporting area for Surabaya is expanding rapidly, that's signified by the development of a society life standart and heterogenity of the community with various activities and fulfil their wellfare. The impact of the development is followed by the raise of quality nor quantity of the criminality, so a security needs of Sidoarjo's community is becoming an essential need, paraleled to another sustainance need.

The Sidoarjo Police resort as law enforcement, public order and public service, is responsible for creating a security needs for it's community, so the sustainance and the development run well.

In order to achieve the security of the community needs, The Indonesian Police had issued public policy in order to improve the quality of service to the people, and the Sidoarjo Police resort is being one of the subsystem in public policy implementation. And the policy about improving service in criminal investigation process in Sidoarjo jurisdiction, is implemented by the the investigation units of Sidoarjo Police resort.

According to Koontz (1988) and Winardi (1987), among the factors that can influence the effectiveness of

public policy implementation, after being converted into organization/The investigation units of Sidoarjo Police resort, there are 5 (five) factors such as :

- a. The ability of investigation units members.
- b. The budget of criminal investigation support.
- c. The procedure of criminal investigation.
- d. The investigation technical function tools support.
- e. The Police external communication effectivity.

Those factors are commonly called as Operational Ability Factors, after being researched in the Sidoarjo jurisdiction about the correlation and contribution of Operational Ability Factors of investigation function to the effectiveness of public policy implementation, and then calculated with statistical technique using SPSS/PC⁺ computer program, resulted that the Correlation was Quite Hight, but the Contribution was Quite Low.

Basically, the main duty of Sidoarjo Police Resort is to provide the security needs for each individual live in Sidoarjo, as declare in the code of law, therefore it takes intervention of authority side to prior the developing operational ability of criminal investigation unit in Sidoarjo Police resort.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional ke suatu situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi 1), karena pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan perubahan-perubahan sosial yang besar, makin tumbuh dan berkembangnya harus bertahap. Hal ini untuk menghindari ekses-ekses yang dapat merugikan proses pembangunan itu sendiri pada tahap rintisananya 2).

Akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan selama PJP I dan memasuki PJP II, atau dengan istilah Tahap Tinggal Landas telah nyata dirasakan hasilnya, dengan terjadinya perubahan-perubahan pada kehidupan sosial masyarakat. Disamping akibat baik (efek) yang ditimbulkan, dilihat dari sudut pandang kepolisian ternyata ada juga yang menimbulkan akibat buruk (dampak) terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat 3), karena kejahatan itu merupakan fenomena sosial (patologis) 4). Moeljarto (1987) menyatakan bahwa dinamika pembangunan itu merupakan sebuah perbenturan nilai 5), sehingga tindak kriminal semakin canggih sebagai dampak dari ke

majuan kehidupan sosial pasca industri 6). Oleh karena hal tersebut diatas, dapatlah kita simpulkan bahwa perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang semakin modern selalu diikuti oleh meningkatnya kejahatan, baik pada kualitasnya maupun pada kuantitasnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tofler (1990), bahwa kejahatan selalu menempel pada peradaban manusia kapanpun juga, bersama-sama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemakmuran ekonomi.

Dalam pembangunan jangka panjang kedua Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertujuan untuk mewujudkan sosok polisi modern. Modernisasi polisi ditandai dari sistem manajemen dan sumber daya manusianya, yang senantiasa siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban untuk mengantisipasi peningkatan kejahatan sebagai dampak dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat tersebut diatas.

Modernisasi tersebut dituntut mewujudkan wawasan operasional yang berskala global, guna mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan yang ada menuntut keberadaan Polri didalam mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat sampai pada kualitas yang diharapkan, sebagaimana dalam Kep/10/X/1993 tanggal 30 Oktober 1993.

Wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo

yang meliputi Kabupaten Sidoarjo karena keadaan Asta Gatranya merupakan salah satu bagian wilayah pengembangan kota Surabaya yang dikenal dengan istilah Gerbang Kertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan yang sarat dengan pembangunan, terutama di sektor industri/perusahaan baik industri besar maupun industri kecil. Menurut data yang diperoleh di lapangan, jumlah perusahaan/industri di wilayah Polres Sidoarjo ± 60 industri/perusahaan, dengan mempekerjakan ± 25.164 orang buruh, dan 11 perusahaan/industri diantaranya adalah Penanaman Modal Asing. Keadaan ini secara langsung ataupun tidak langsung, telah mengundang para pendatang dari daerah lain (urbanisasi) bahkan dari luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan penduduk sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini :

TABEL 1
PERKEMBANGAN PENDUDUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NO	TAHUN	STATUS		JUMLAH
		WNI	WNA	
1	1991	1.000.114	201.044	1.204.208
2	1992	1.421.005	199.012	1.620.117
3	1993	1.621.708	287.809	1.908.507
4	1994	1.920.118	192.364	2.092.582

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, 1994.

Dampak dari pada fenomenon sosial tersebut diatas, secara kuantitas dan kualitas antara lain dapat dilihat pada trend perkembangan kriminalitas di wilayah hukum Polres Sidoarjo, sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini :

TABEL 2
CRIME TOTAL DAN CRIME INDEX
KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME INDEX
1	1990	1.705	764
2	1991	1.441	627
3	1992	1.086	421
4	1993	865	367
5	1994	797	348
	JUMLAH	5.932	2.527

Sumber : Polres Sidoarjo (Data tidak termasuk perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana pelanggaran).

Dalam rangka menanggulangi dan menekan trend perkembangan kriminalitas tersebut diatas, Polres Sidoarjo mempunyai kekuatan personil sebagai berikut :

TABEL 3
KEADAAN PERSONIL
BERDASARKAN KEPANGKATAN
POLRES SIDOARJO

NO	KEPANGKATAN	RIIL	DSPP	KET
1	Pamen : Letkol Mayor	1 1	1 1	Cukup cukup
2	Pama : Kapten Letnan	6 29	4 47	+ 2 - 18
3	Bintara	475	757	- 292
4	Tamtama	119	67	+ 52
5	PNS	44	42	+ 2
	JUMLAH	675	919	- 244

Sumber : Subbag Pers Polwil Surabaya

Kemampuan tersebut tidak dikonsentrasikan pada satu tempat, akan tetapi selain wdi Markas Komando Polres Sidoarjo tersebar di 18 Kepolisian Sektor (Polsek) yang mempunyai wilayah hukum Polsek sesuai dengan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/XII/1993 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok dan Prosedur Badan-badan pada Tingkat Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1993 , jajaran Polsek di Polres Sidoarjo terdiri dari tiga typologi Polsek, yaitu Polsek Selektif B/Standar A sebanyak 2 Polsek, Polsek Selektif C /Standar B sebanyak 1 Polsek , dan Polsek Standar sebanyak 15

Polsek yaitu sebagai berikut dibawah ini :

a. Polsek Selektif B / Standar A yaitu :

- 1) Polsek Krian
- 2) Polsek Sidoarjo Kota

b. Polsek Selektif C / Standar B yaitu :

- 1) Polsek Porong

c. Polsek Standar yaitu :

- 1) Polsek Waru
- 2) Polsek Buduran
- 3) Polsek Wonoayu
- 4) Polsek Prambon
- 5) Polsek Tarik
- 6) Polsek Taman
- 7) Polsek Gedangan
- 8) Polsek Sukodono
- 9) Polsek Sedati
- 10) Polsek Tanggulangin
- 11) Polsek Jabon
- 12) Polsek Tulangan
- 13) Polsek Krembung
- 14) Polsek Candi
- 15) Polsek Balong Bendo



Polres Sidoarjo sebagai kesatuan Polri di kewilayahan, memainkan peran dan fungsinya dengan melakukan tugas-tugas yang bertujuan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia⁷⁾. Kedua Undang-undang tersebut mengatur tugas Polri yang isinya : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 " ... Kepolisian negara mempunyai tugas memelihara ketertiban umum ... memelihara keselamatan masyarakat". Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 adalah : "Guna terselenggaranya tugas-tugas kepolisian ... dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat ... ". Sedemikian rincinya dan sudah sejak tahun 1961 tugas-tugas Kepolisian diatur sedemikian rupa, tiada lain adalah atas kehendak rakyat. Hal ini mengandung arti bahwa sudah sejak ± 34 tahun yang lalu, masyarakat menginginkan keteraturan tugas-tugas Kepolisian yang sesuai dengan kehendak bangsa sendiri, yaitu kebutuhan akan rasa aman, agar masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dalam rangka memenuhi kesejahteraannya. Keinginan masyarakat terhadap keteraturan tugas-tugas Kepolisian ini, mempunyai alasan

yang kuat, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Reckless (1961), bahwa baik buruknya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat suatu negara, paling tidak dipengaruhi oleh 5 hal yaitu :

- a. Bagaimana sistem dan organisasi Kepolisiannya.
- b. Bagaimana sistem Hukumnya.
- c. Bagaimana Peradilannya.
- d. Bagaimana sistem Birokrasinya dalam membina keamanan umum dan ketertiban masyarakat dan Pene-gakan hukumnya.
- e. Bagaimana partisipasi masyarakatnya 8).

Dan kebutuhan akan rasa aman ini bukanlah rasa yang berlebihan, karena rasa aman merupakan kebutuhan hakiki kehidupan manusia, sebagaimana dikemukakan Maslow (1991) tentang "heararchy of needs", dimana dalam kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan "rasa aman" terletak pada peringkat kedua setelah kebutuhan phisik, dan untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

- a. Physiological Needs.
- b. Security Needs.
- c. Aviliation/Acceptantion Needs.
- d. Esteem Needs.
- e. Self Actualization needs 9).

Dari uraian-uraian diatas, yang menggambarkan kemajuan pembangunan di wilayah hukum Polres Sidoarjo yang semakin meningkat tajam, dan untuk menjaga kestabilan trend perkembangan kehidupan sosial masyarakat Sidoarjo tersebut, membutuhkan perlindungan Polri dalam

rangka memberikan rasa aman dari gangguan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat, dan hal itu merupakan tugas dan tanggungjawab Polres Sidoarjo untuk mewujudkannya, dengan berpedoman pada pilar-pilar tugas pokok Polri seperti yang dimuat dalam "Kode Etik Polri", karena tanpa rasa aman dan tenteram masyarakat Sidoarjo akan terganggu dalam melakukan aktivitas membangun. Oleh karena itu tepatlah sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmadja (1969), bahwa tugas pokok Polri diilhami oleh "Tata Tentram Kerta Raharja" di dalam bukunya "Tri Brata" yaitu sebagai berikut :

"Tiap masyarakat bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan : *Raharja*. Raharja tidak datang begitu saja bagaikan embun di waktu pagi, melainkan harus diperjuangkan dengan kegiatan atau kesibukan usaha-usaha dari masyarakat : *Kerta*. Kerta tidak muncul begitu saja di tengah-tengah masyarakat, tetapi harus didasarkan atas rasa aman di kalangan masyarakat : *Tentram* . Pada gilirannya tentram tidak begitu saja dapat tercapai, melainkan untuk orang-orang itu harus mempunyai kepastian atau terdapat ketertiban di kalangan masyarakat : *Tata* 10).

B. Permasalahan dan Perumusan Masalah

Berangkat dari pandangan yang dikemukakan Goulet (1973), bahwa pembangunan mempunyai tiga komponen utama yaitu :

- a. Life sustenance (Kelangsungan hidup)
- b. Self esteem (Kehormatan diri)
- c. Freedom (Kebebasan) 11).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pembangunan di wilayah Sidoarjo, Polres Sidoarjo mempunyai tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam memenuhi salah satu unsur komponen "kelangsungan hidup", yaitu memberikan perlindungan "in order to be more" untuk mendapatkan rasa aman dalam masyarakat yang sejajar dengan kebutuhan masyarakat terhadap sandang, pangan dan kesehatan, agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia 12).

Untuk dapat mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakatnya, telah banyak dilakukan intervensi dalam rangka pembinaan organisasi Polri/Polres Sidoarjo, antara lain instrumen utamanya adalah berupa kebijakan publik yang dimuat dalam Ketetapan MPR RI nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993-1998, yangmana isinya antara lain adalah memberikan arah penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut : agar ditingkatkan kemampuan dan kewibawaan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas, dan adil, melalui sikap dan perilaku serta keteladanan sesuai

dengan tugas dan wewenangnya. Untuk pelaksanaan tugasnya dalam penegakan hukum ini, Polres Sidoarjo tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto (1983) dalam bukunya "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" yaitu sebagai berikut :

- a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil.
- b. Organisasi yang baik.
- c. Peralatan yang memadai.
- d. Keuangan yang cukup dan seterusnya 13).

Dalam rangka mengantisipasi dampak daripada modernisasi, dan pembinaan organisasi dapat pula dilihat jabaran dari GEHN tentang arah kebijakan pembangunan bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Renstra Hankam IV tahun 1989-1994, yang menggariskan sebagai berikut :

"... Materiil dan fasilitas. Kemampuan sumber daya untuk investasi materiil dan fasilitas dalam rangka usaha modernisasi Abri perlu ditingkatkan, sampai batas yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan agar tidak ketinggalan, ..." 14).

Kebijakan dan strategi tersebut diatas, rupanya sulit untuk direalisasikan sepenuhnya, khususnya untuk Polres Sidoarjo masih banyak terdapat kekurangan dari segi kemampuan operasionalnya. Hal ini disebabkan antara

lain adalah karena terbatasnya dana pemerintah yang dialokasikan untuk Polri/Polres Sidoarjo, karena political will atau political feasibility yang berada diluar organisasi Polri, dan disisi lain tuntutan kualitas penegakan hukum terus meningkat. Untuk melengkapi kekurangan kemampuan operasional tersebut perlu intervensi para pimpinan kesatuan secara berjenjang, dari tingkat Mabes Polri sampai kesatuan terbawah/Polsek untuk melakukan terobosan-terobosan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thoha (1993) dalam bukunya Pembinaan Organisasi sebagai berikut :

"bahwa intervensi merupakan salah satu usaha Pembinaan Organisasi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi keseluruhan. Intervensi yang dijalankan ini berupaya untuk melakukan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Intervensi ini harus direncanakan secara seksama agar dicapai efektifitas dan efisiensi perubahan" ¹⁵⁾.

Oleh karena itu untuk mendukung kebijakan, keputusan dan petunjuk tentang pengoperasionalan tugas-tugas Kepolisian, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat, dikeluarkan suatu Kebijakan Polri yang berbentuk Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/10/X/1993 tanggal 30 Oktober 1993 tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri. Dengan mengimplementasikan Keputusan tersebut terlihat dari data Crime Total atau Jumlah Perkara Pidana yang terjadi di wilayah

Polres Sidoarjo turun dengan tajam dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan dilihat dari Police Employ Rate, yaitu perbandingan antara jumlah Polisi dengan masyarakat di Polres Sidoarjo masih jauh dibawah standar minimal, (standar minimal menurut Interpol/ICPO adalah 1 : 500), dan kekuatan personil yang ada (riil) dibandingkan dengan personil yang seharusnya ada sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993, tentang Daftar Susunan Personil dan Perlengkapan Kepolisian Negara RI juga masih banyak kekurangan, dan kekurangan itu justru ditingkat Perwira Pertama dan Bintara sebagaimana digambarkan pada Tabel 3 di atas.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka dibawah ini dirumuskan masalah sbb :

"Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas Implementasi Kebijakan Polri sebagaimana dituangkan dalam Kep/10/X/1993, yang dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada proses penyidikan perkara pidana ?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas implementasi kebijakan Polri, sebagaimana yang dituangkan dalam Kep/10/X/1993, yang dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada proses penyidikan perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas Implementasi Kebijakan Polri, sebagaimana dituangkan dalam Kep/10/X/1993, yang dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada proses penyidikan perkara pidana.
- c. Untuk mencoba mengamati aplikasi ilmu Administrasi dengan konsentrasi Kebijakan Publik, yang diperoleh dari perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Untag Surabaya secara nyata di lapangan. Kemudian hasilnya digunakan untuk mendukung penulisan thesis ini, dan sekaligus menambah pengalaman penulis di bidang penelitian.

2. Menfaat penelitian

- a. Sebagai informasi yang bersifat ilmiah yang diberikan kepada Almamater Program Studi Magister Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Untag Surabaya dan Polri, dalam rangka pengembangan Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Kebijakan Publik, yang ditujukan kepada pengembangan dan pembinaan organisasi Polri.
- b. Sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang berminat, untuk mengembangkan penelitian di bidang Kepolisian selanjutnya.

D. Sistematika

Dalam mempersiapkan penulisan thesis ini, telah diusahakan semaksimal kemampuan penulis untuk mempelajari semua bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan thesis, dan penelitian di lapangan dengan waktu yang sangat terbatas, yang disebabkan oleh tugas-tugas yang tidak dapat penulis tinggalkan sebagai anggota Polri. Setelah semua bahan kepustakaan dan data-data yang diperlukan dianalisa, maka dibuatlah suatu sistematika penulis an sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika. Dalam bab ini penulis berusaha untuk mengantar pembaca ke pokok keseluruhan thesis yang akan dibahas, dengan harapan para pembaca dapat memperoleh gambaran secara garis besarnya.

Bab II Kerangka Teoritis dan Hipotesis, dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori atau pendapat-pendapat dari para pakar yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan Ilmu Kebijakan Publik dan Manajemen, kemudian penulis rangkai dan fokuskan kepada pokok permasalahan yang akan dikaji atau diadakan analisis. Kemudian penulis mengajukan Hipotesis sebagai jawaban sementara dari masalah yang telah dirumuskan pada bab I yang perlu diuji kebenarannya pada bab IV.

Bab III Metode Penelitian, di dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan di lapangan, dalam rangka mencari data-data yang akan dianalisa untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian diuraikan pemilihan sampel yang akan dijadikan obyek penelitian serta instrumen penelitian dan

teknik analisa data yang digunakan, dan untuk lebih jelasnya penulis menguraikan definisi operasional atau batasan variabel-variabel yang akan diteliti untuk dioperasionalkan.

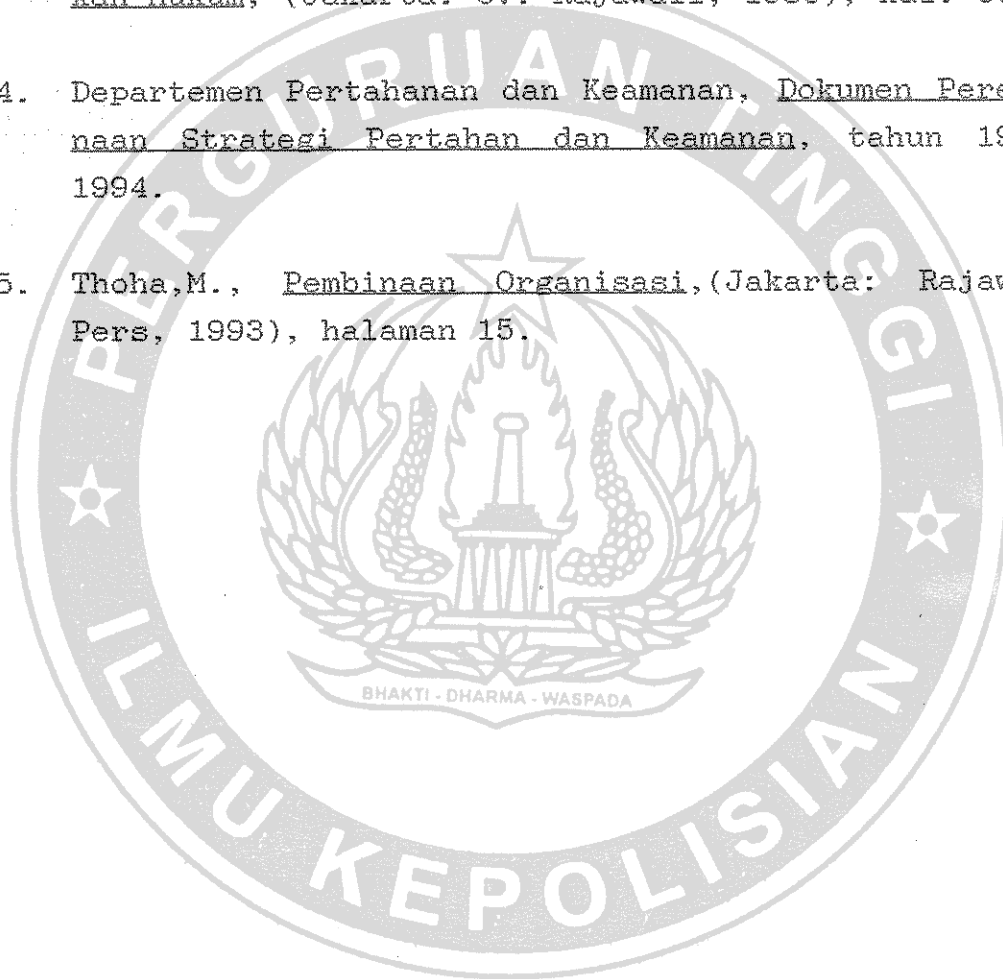
Bab IV Penyajian dan Analisis Data, dalam bab ini penulis menyajikan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian, baik data-data primer maupun data-data sekunder, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisa yang telah dipilih atau ditentukan dalam rangka pengujian hipotesis yang telah dikemukakan pada bab II.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis berusaha untuk membuat suatu kesimpulan, sebagai hasil dari pengujian terhadap hipotesis yang dikemukakan atau sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Kemudian penulis mengajukan beberapa saran, dengan harapan dapat berguna dalam rangka pembinaan dan pengembangan daerah obyek penelitian/Polres Sidoarjo khususnya dan Polri pada umumnya.

CATATAN AKHIR

1. Moeljarto, T., Politik Pembangunan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), halaman 3.
2. Adelman, I., Morris, C.T., Economical Growth and Social Equity in Developing Countries, (Stanford University Press, California, 1977), dalam buku, Pembangunan Dasar-dasar dan Pengertiannya, Ryadi, SAL., hal. 13.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Indonesian Police, (Jakarta, Gramedia, 1993), halaman 97.
4. Satjipto, R., Kompas, 19 Sept 1994.
5. Moeljarto, T., op.cit., halaman 10.
6. Soejono, D., Pelita, 23 Des 1991 halaman 9.
7. Brotodiredjo, S., Tugas Kepolisian Negara RI Dalam Undang-undang, (Bandung: Langlang Buana, 1987) hal.15.
8. Reckless, W.C., The Crime Problem, (New York, 1961), halaman 21.
9. Maslow, A., Motivation and Personality, (New York: Harper & Brother, 1954). halaman 89.
10. Atmadja, R.S.S., Tri Brata (Subarkah, Mintaraga, 1969), halaman 15.
11. Moeljarto, T., loc.cit., halaman 9.

12. Goulet, Denis, The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development, (New York, Atheneum, 1973), halaman 124.
13. Soekanto, S., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 30.
14. Departemen Pertahanan dan Keamanan, Dokumen Perencanaan Strategi Pertahan dan Keamanan, tahun 1989-1994.
15. Thoha, M., Pembinaan Organisasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), halaman 15.



BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

A. Latar Belakang Kebijakan

Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing organisasi tersebut ¹⁾. Di dalam organisasi yang masih sederhana, dimana tujuan yang ingin dicapai dituangkan di dalam pola rencana, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pelaksanaan kegiatan dan langsung dievaluasi atas kegiatan terhadap rencana tersebut. Tetapi di dalam organisasi yang memiliki skala nasional, segala tindakan manajemen, agar dapat diketahui sebagai kerangka acuan didalam pelaksanaannya, diperlukan pernyataan kehendak untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Segala pernyataan tersebut dicetuskan oleh kelompok elite, yang didalam disiplin ilmu Administrasi Negara lebih dikenal dengan istilah Kebijakan Public.

Kepolisian Negara R.I. yang dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya sebagai alat negara penegak hukum, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ²⁾, agar tercipta tingkat efektifitas pelayanan yang diukur dari kepuasan masyarakat, mengambil langkah yang konkrit

sebagaimana tertuang didalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/10/X/1993 tanggal 30 Oktober 1993, tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri. Kebijakan ini bukanlah suatu kebijakan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan kebijakan untuk mendukung kebijakan-kebijakan sebelumnya, dan untuk pengoperasionalan kebijakan tersebut dikeluarkan instruksi dan petunjuk sebagai berikut :

- a. Instruksi Kapolri No. Pol. : Ins/10/XII/1993 tanggal 11 Desember 1993, tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri.
- b. Juknis Kapolri No. Pol. : Juknis/11/III/1993 tanggal 1 Maret 1993, tentang Peningkatan Pelayanan Polri di bidang Operasional dan Pembinaan.
- c. Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/07/V/94, tanggal 27 Mei 1994 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan di Tingkat Polres.
- d. Juklak Kapolda Jatim No. Pol. : Juklak/14/VI/1992 tanggal 17 Juni 1992 tentang Pelayanan masyarakat oleh Polri di Jajaran Polda Jatim.
- e. Petunjuk-petunjuk Lapangan Kapolda Jatim sehubungan dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Polri di Jajaran Polda Jatim.

- f. Standar Kualitas Kerja masing-masing fungsi teknis Kepolisian sesuai dengan bentuk atau jenis kegiatannya.

Lahirnya Kebijakan Polri tersebut sebagai event untuk diimplementasikan mempunyai latar belakang tertentu, yang menyebabkan diformulasikannya suatu kebijakan, latar belakang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tugas pelayanan sebagai perwujudan jati diri Polri pada hakekatnya adalah tugas seluruh anggota Polri. Hasil pengamatan di lapangan selama ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polri masih jauh dari harapan ... "
- b. "... Tantangan yang sangat dominan yaitu antara lain : sangat terbatasnya sumber daya Polri, perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang demikian cepat, perubahan pola dan bentuk kejahatan, tuntutan kebutuhan akan kemitraan antara Polri, masyarakat dan instansi pemerintah terkait ... "
- c. "... : adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang kurang bermanfaat ..., adanya unit organisasi yang tidak berfungsi..., masih sangat panjangnya rantai birokrasi komando dan kurang konsistennya pelaksanaan waskat³⁾.

B. Isi dan Tujuan Kebijakan

1. Isi kebijakan. Isi kebijakan sebagaimana tertuang dalam Keputusan pada dasarnya menetapkan 5(lima)

sasaran strategik yaitu sebagai berikut :

- a) Terciptanya budaya pelayanan.
- b) Terciptanya budaya kinerja.
- c) Hidupnya garis komando dan pengendalian.
- d) Diperkuatnya unit yang berfungsi sebagai ujung tombak
- e) Aktifnya kepemimpinan strategik.

2. Tujuan kebijakan. Sebagaimana yang dimuat dalam Kep/10/X/1993 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh di semua tingkat organisasi. Terutama di tingkat Polres dan jajarannya yang secara langsung, terus menerus selalu berhubungan dengan masyarakat di titik-titik pelaksanaan pelayanan.

3. Pelayanan Polri. Yang dimaksud dengan pelayanan Polri dalam kebijakan Kep/10/X/1993 tersebut meliputi pelayanan ke dalam (intern) dan pelayanan ke luar (ektern) terhadap para pelanggan Polri.

Pelayanan ke dalam adalah pelayanan yang diberikan oleh unsur pendukung kepada para pelaksana pelayanan masyarakat, baik perorangan maupun satuan. Sedangkan pelayanan ke luar (ektern) adalah pelayanan kepada masyarakat, yaitu kemampuan untuk

menerima, menanggapi, memberikan bantuan, petunjuk atau pengarahan pada masyarakat atas segala laporan/pengaduan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang yang ada secara cepat, tepat, dan etnis.

4. **Hakekat tujuan pelayanan.** Tujuan akhir daripada semua kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang/pelanggan adalah agar orang/pelanggan yang dilayani merasa puas, senang, nyaman, bahagia, merasa dihormati dan akan menimbulkan rasa yakin dan kepercayaan serta penghargaan dari orang yang dilayani kepada Polri.

**C. Implementasi Kebijakan Polri
pada Proses Penyidikan Perkara Pidana
di Polres Sidoarjo.**

Implementasi atas kebijakan dilakukan oleh para pelaksana (implementative) yang lebih dikenal dengan sebutan birokrasi pemerintah. Para Administrator kebijakan, melakukan tindakan berdasarkan petunjuk yang telah ditafsirkan didalam kebijakan yang bersangkutan. Bentuk kebijakan yang digunakan oleh birokrat dalam implementasi telah tertuang didalam isi kebijakan diantaranya :

- a. Tujuan kebijakan
- b. Alokasi dana
- c. Personil
- d. Sumber daya lain
- e. Prosedur kerja ⁴⁾.

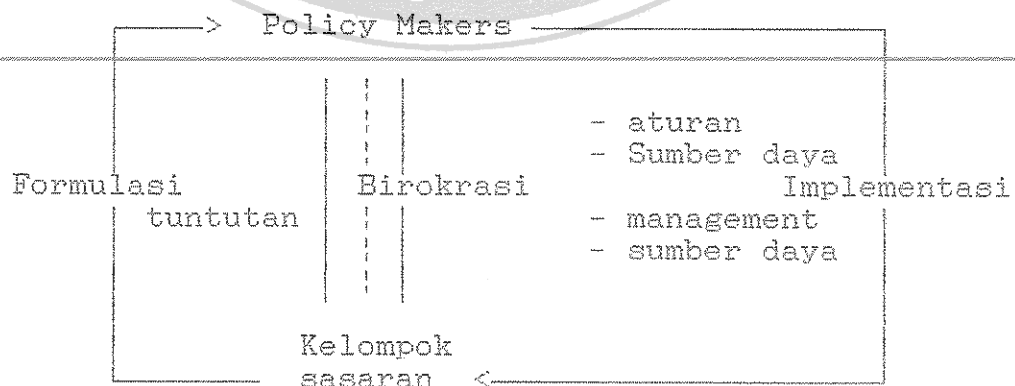
Bentuk siklus implementasi kebijakan dapat dilihat seperti diagram berikut :

Model I



(Winardi, 1987)

Model II



(Winardi, 1987)

Implementasi atas kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana dilakukan oleh para penyidik/anggota Reserse jajaran Polres Sidoarjo, berdasarkan prinsip administrasi dalam komando dan pengendalian yang berlaku dalam struktur organisasi Polri yaitu administrasi satu pintu, maka para penyidik yang berada dalam satu satuan kewilayahan dikoordinir oleh Kapolres Sidoarjo untuk tingkat Polres, dan Kapolsek untuk tingkat Polsek yang karena jabatannya bertindak selaku Penyidik. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya sebagaimana dimuat dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok dan Prosedur Badan-badan pada Tingkat Kewilayahan Kepolisian Negara RI, fungsi Reserse di jajaran Polres Sidoarjo dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dimuat dalam Kep/10/X/1993 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Polri, peningkatan kualitas pelayanan ini dapat dirinci dalam 3(tiga) bentuk kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Menekan peningkatan trend perkembangan kriminalitas dengan tindakan represif yustisiil.
- b. Meningkatkan penyelesaian perkara pidana (crime

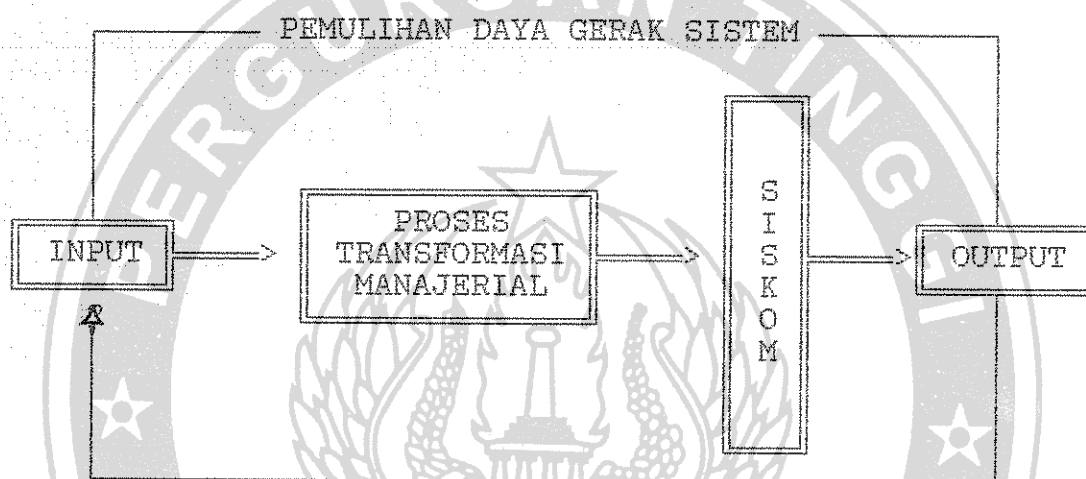
clearance).

- c. Secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermasalah dan atau tersangkut dalam proses penyidikan perkara pidana.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Implementasi Kebijakan Polri pada Proses Penyidikan Perkara Pidana

Berangkat dari teori Pendekatan sistem untuk Manajemen yang dikemukakan oleh Koontz (1988), bahwa sebuah sistem pada hakikatnya adalah seperangkat hal yang saling berkaitan, atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks 5). Di dalam sistem tersebut dikemukakan model input-output yang unsur unsurnya adalah ; Input, sebagai bahan mentah yang akan diproses menjadi output melalui proses transformasi manajerial; Proses Transformasi Manajerial adalah tempat proses perubahan bahan mentah yang menjadi input sehingga menghasilkan output ; Output adalah merupakan hasil daripada proses transformasi manajerial yang sesuai dengan tujuan dari proses yang siap untuk ditransformasi ke lingkungan luar ; Komunikasi adalah suatu sarana yang digunakan pada setiap tingkatan manajemen baik untuk di dalam organisasi sendiri maupun untuk menghubungkan

organisasi dengan lingkungan luarnya, yaitu para pelanggan yang akan mengkonsumsi output, atau sebagai pemasok input bagi proses transformasi. Untuk jelasnya dikemukakan Model Input-Output yang dikemukakan Koontz sebagai berikut di bawah ini :



(Koontz, 1988). Hal.23.

Menurut Koontz bahwa yang menjadi input dari proses manajemen pada sistem tersebut di atas adalah Manusia, Modal, Manajemen, Teknologi dan Input sasarannya adalah Pekerja, Pembeli, Penjual, Pemegang saham, Pemerintah, Masyarakat dan lain-lain, sedangkan Outputnya adalah berupa Produk, Pelayanan, Laba, Kepuasan, Pemaduan sasaran, dan lain-lain ⁶⁾. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa input-input tersebut adalah merupakan Obyek daripada manajemen atau dengan kata lain ia adalah merupakan sumber daya yang akan dikelola oleh manajemen,

sedangkan Output merupakan hakekat daripada tujuan proses manajemen.

Kemudian Koontz (1990) menekankan bahwa, melalui komunikasi setiap organisasi merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya 7). Sehubungan dengan hal tersebut maka Polres Sidoarjo sebagai suatu sistem yang terbuka tidak luput dari rasa pentingnya komunikasi ini, dan komunikasi untuk keluar organisasi dilaksanakan oleh setiap anggota Polri/anggota Reserse Polres Sidoarjo terhadap anggota masyarakat yang dihadapinya dalam proses penyidikan perkara pidana, sedangkan Komunikasi dalam arti informasi untuk masyarakat luas/dunia Press terbatas pada Kapolres yang didampingi oleh Kepala Dinas Penerangan Polda Jawa Timur.

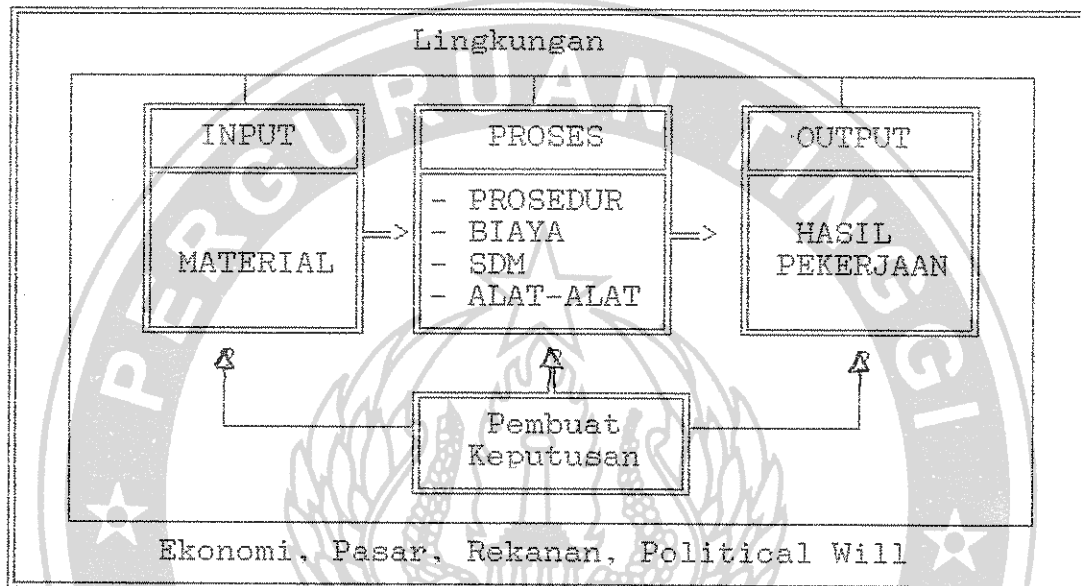
Pentingnya Komunikasi ini sangat disadari oleh seluruh jajaran Polres Sidoarjo, khususnya anggota Reserse. Karena dengan Komunikasi anggota Reserse akan mendapatkan informasi yang berharga yang dapat membantu kelancaran proses penyidikan yang ditangani, dan juga akan mengetahui informasi tuntutan pelayanan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses penyidikan, serta anggota Reserse juga dapat mengetahui kerisauan-kerisauan yang berkembang dalam masyarakat, sehubungan dengan perkara pidana yang ditanganinya. Sebagaimana yang ditegaskan Koontz (1990), bahwa melalui pertukaran

informasi para manajer mengetahui kebutuhan-kebutuhan pelanggan, ketersediaan-persediaan dari rekanan (suppliers), tuntutan pemegang saham, peraturan-peraturan pemerintah, dan kerisauan-kerisauan masyarakat 8).

Pada kenyataannya informasi tentang Polri/Polres Sidoarjo atau perkara pidana yang ditangani oleh anggota Reserse sering dimuat di media massa tanpa melalui saluran yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengurangi citra Polri di mata masyarakat. Di dalam hubungan ini media cetak cenderung lebih suka menyajikan berita yang mendiskreditkan Polisi, misalnya polisi memeras, polisi dipecat dari jabatannya 9), sehingga diperlukan adanya hubungan baik antara insan prese dan Kepolisian 10), karena informasi/penerangan akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Polri, sehingga akan menimbulkan public opinion yang baik tentang Polri di kalangan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bonar (1973), bahwa penerangan dapat membuat masyarakat menjadi mengerti terhadap kebijakan pemerintah 11).

Winardi (1987) berpendapat bahwa administrator (birokrat) bertindak dengan melibatkan kemampuan sumber daya organisasi, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan membawa perubahan keadaan pemecahan problem yang terjadi. Proses implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan pada pendekatan sistem (yaitu: input, proses

dan out put), yang dikelilingi oleh suatu lingkungan Environmental 12). Proses tersebut sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :



(Winardi, 1987)

Dari kedua pendekatan sistem untuk manajemen yang dikemukakan oleh Koontz dan Winardi tersebut pada dasarnya sama yaitu dengan menggunakan Model Input-Output dan masing-masing mempunyai kelebihan.

Bila dikaitkan dengan sistem yang digunakan dalam pengimplementasian Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, maka sebagai obyek manajemen yang akan dikelola adalah sebagai berikut :

- a. Perkara pidana, yang dilaporkan dan atau yang

ditemukan oleh anggota Polri yang menjadi kewenangan Polres Sidoarjo untuk mengadakan penyidikan menurut perundang-undangan, sebagaimana yang dikemukakan Wilson (1960), bahwa kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi, mungkin dilaporkan oleh si korban atau anggota masyarakat atau mungkin diketahui oleh polisi yang sedang bertugas (13), karena Polri merupakan gerbang dari pada proses perkara pidana. Baldwin (1978) mengemukakan, bahwa kedudukan polisi sebagai pelaksana sistem peradilan dikatakan ibarat penjaga pintu gerbang dalam proses peradilan pidana ("the police as gate keepers of the criminal process") (14), perkara pidana yang dilaporkan tersebut berkonotasi atau yang mengandung isi sebagai berikut :

- 1) Adanya hukum atau peraturan yang dilanggar
- 2) Adanya anggota masyarakat atau suatu instansi yang memerlukan pelayanan hukum atau Polri/Polres Sidoarjo.

b. Kemampuan Anggota Reserse jajaran Polres Sidoarjo, sebagai kekuatan pelaksana penyidikan

yang mentransformasikan perkara pidana (input) melalui proses penyidikan perkara pidana berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1982 (KUHP), dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan penyidikan lainnya sebagai instrumentalnya, untuk menghasilkan output. Keberadaan Anggota Reserse sebagai sumber daya manusia pada satuan Reserse, telah diatur di dalam keputusan Kapolri No.Pol: Kep/15/XII/93 tanggal 31 Desember 1993. Bentuk kebijakan terhadap alokasi anggota reserse berdasarkan keputusan tersebut adalah :

1) **Kuantitas :**

Dari unsur jumlah personil, dibedakan kedalam masing-masing klasifikasi Polres/Polsek, dimana Polres Sidoarjo termasuk dalam klasifikasi Polres Standar dengan anggota serse sebanyak 26 orang dan didukung dengan jajaran yaitu sbb:

- a) Polsek Selektif B/Standar A sebanyak 2 Polsek dengan 34 orang anggota
- b) Polsek Selektif C/Standar B sebanyak 1 Polsek dengan 13 anggota
- c) Polsek Standar sebanyak 15 Polsek

dengan 75 anggota

2) **Kualitas :**

Keberadaan kualitas anggota sersa dibedakan kedalam jenjang kepangkatannya, yang terdiri atas :

a)	Letnan	=	5	orang
b)	Bintara Tinggi	=	30	orang
c)	Bintara	=	111	orang
d)	PNS	=	2	orang
J u m l a h		=	148	orang

c. Biaya penyidikan perkara pidana, sebagai pendukung terlaksananya proses penyidikan. Biaya Penyidikan Perkara Pidana ini diturunkan ke Polres Sidoarjo berdasarkan Perintah Pelaksanaan Program (P-3) Kapolda Jawa Timur antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) No. Pol. : P-3/00410/VII/90/Polres SDA, untuk Triwulan I TA. 1990-1991, tanggal 18 Agustus 1990.
- 2) No. Pol. : P-3/00275/VII/91/Polres SDA, untuk Triwulan I TA. 1991-1992. tanggal 17 Juli 1991.

- 3) No. Pol. : P-3/00159/VI/92/Polres SDA,
untuk Triwulan I TA. 1992-1993. tanggal 29
Juni 1992.
- 4) No. Pol. : P-3/00332/VII/93/Polres SDA,
untuk Triwulan I TA. 1993-1994. tanggal 28
Juli 1993.
- 5) No. Pol. : P-3/00706/XI/94/Polres SDA,
untuk Triwulan I TA. 1994-1995. tanggal 30
November 1994.

Besarnya Biaya Penyidikan Perkara per
tahun menurut klasifikasi perkara adalah
sebagai berikut :

- a) Periode TA 1990-1991 s/d TA.1991-1992
adalah :

- | | |
|----------------------|------------|
| (1) Perkara Berat = | Rp. 25,000 |
| (2) Perkara Ringan = | Rp. 15,000 |
| (3) Pelanggaran = | Rp. 2,500 |

- b) Periode TA.1992-1993 s/d TA.1994-1995
adalah :

- | | |
|----------------------|-------------|
| (1) Perkara Berat = | Rp. 125,000 |
| (2) Perkara Ringan = | Rp. 35,000 |

(3) Pelanggaran = Rp. 10,000

Menurut data yang ada sesuai dengan klasifikasi perkara ini, Satuan Fungsi Reserse Polres Sidoarjo menangani perkara berat saja, sehingga besarnya biaya penyidikan seharusnya per Tahun Anggaran yang dialokasikan adalah :

$\Sigma \text{Biaya} = \Sigma \text{Perkara} \times \text{Biaya perkara berat}$

d. Prosedur penyidikan perkara pidana, sebagai instrumental/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh anggota reserse, dalam memberikan jasa pelayanan pada proses penyidikan perkara pidana, dan secara teoritis bahwa "prosedure is a sequence of clerical operation, usually involving stuard people in one or more departement, established to ensure uniform handling of a recuring transaction of the business" 15). Berdasarkan pandangan tersebut, bahwa proses atas aplikasi kebijakan terkandung makna bahwa :

- 1) Merupakan urutan pekerjaan.
- 2) Dilakukan oleh karyawan (clerical).

- 3) Melibatkan beberapa orang dalam depertemen
- 4) Menggunakan formulir.
- 5) Sebagai kegiatan organisasi.

Dan prosedur yang harus dilalui/dilakukan oleh anggota reserse Polres Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1982 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Perintah Pelaksanaan Nomor 27 tahun 1983 tentang Pemberlakuan KUHP.
- 3) Juklak No.Pol: Juklak/04/II/83 tentang proses penyidikan perkara.
- 4) Juklak No.Pol : Juklak/07/V/94 tentang peningkatan kualitas pelayanan Polri ditingkat Polres dan Polsek.
- 5) Juknis No.Pol: Juknis/01/II/1982 tentang Penanganan TKP.
- 6) Juknis No.Pol: Juknis/02/II/182, tentang pemanggilan tersangka dan saksi.
- 7) Juknis No.Pol: Juknis/01/II/1982 tentang penangkapan.
- 8) Juknis No.pol: Juknis/04/II/1982, tentang

penahanan.

- 9) Juknis No.Pol: Juknis/05/II/1982, tentang penggeledahan.
- 10) Juknis No.Pol: Juknis/06/II/1982, tentang penyitaan barang bukti.
- 11) Juknis No.Pol: Juknis/07/II/1982, tentang pemeriksaan tersangka dan saksi.
- 12) Juknis No.Pol: Juknis/08/II/1982, tentang pencatatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi.
- 13) Juknis No.Pol : Juknis/09/II/1982, tentang pembuatan Resume.
- 14) Juknis No.Pol: Juknis/10/II/1982, tentang penyusunan Isi Berkas perkara dan pemeriksaan.
- 15) Juknis No.Pol: Juknis/11/II/1982, tentang penyerahan berkas perkara.

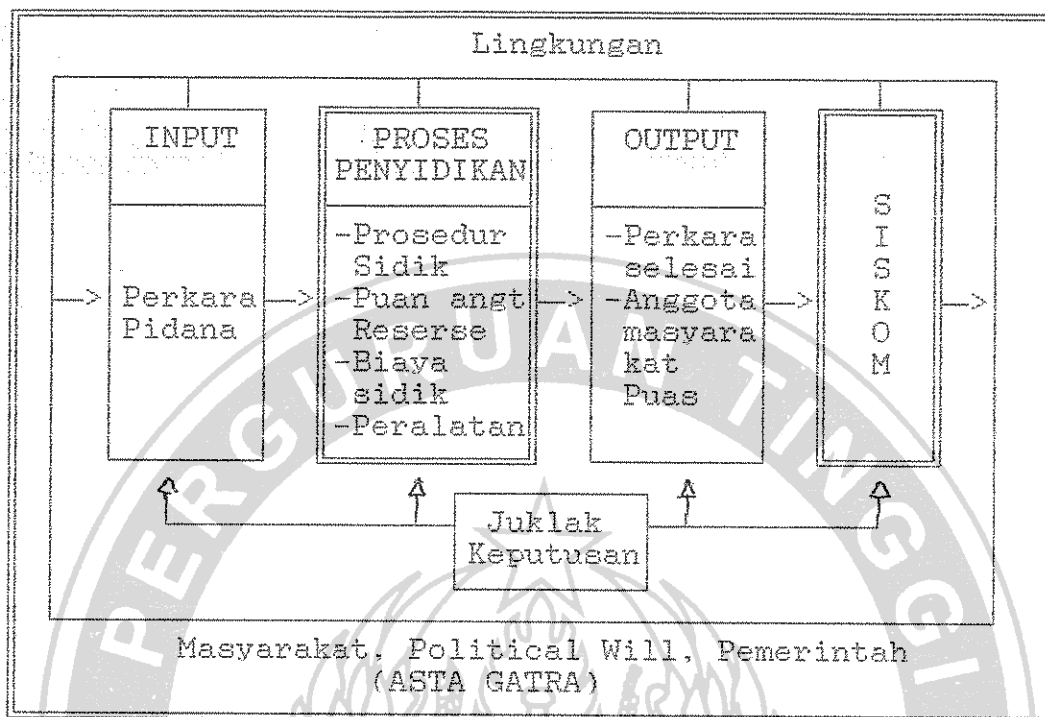
e. Peralatan fungsi teknis reserse, sebagai peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara pidana, baik peralatan utama maupun peralatan khusus, berdasarkan pada Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/15/XII/93 Tgl 31 Desember 1993 tentang daftar susunan personel dan peralatan (DSPP), Peralatan yang ada pada

Polres Sidoarjo adalah :

(a) Senpi genggam	=	54	pucuk
(b) Sepeda motor	=	13	buah
(c) Kendaraan khusus	=	2	buah
(d) Mesin tik	=	13	buah
(e) H.T.	=	15	buah

Berdasarkan teori-teori dan pendapat para pakar tersebut diatas, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Pendekatan Teori Sistem terhadap Manajemen, yang dikonversikan atau diproyeksikan pada sistem penyidikan perkara pidana yang ada di Satuan Fungsi Reserse Polres Sidoarjo dan jajarannya, dikemukakan sebuah model Input-Output sebagai berikut :

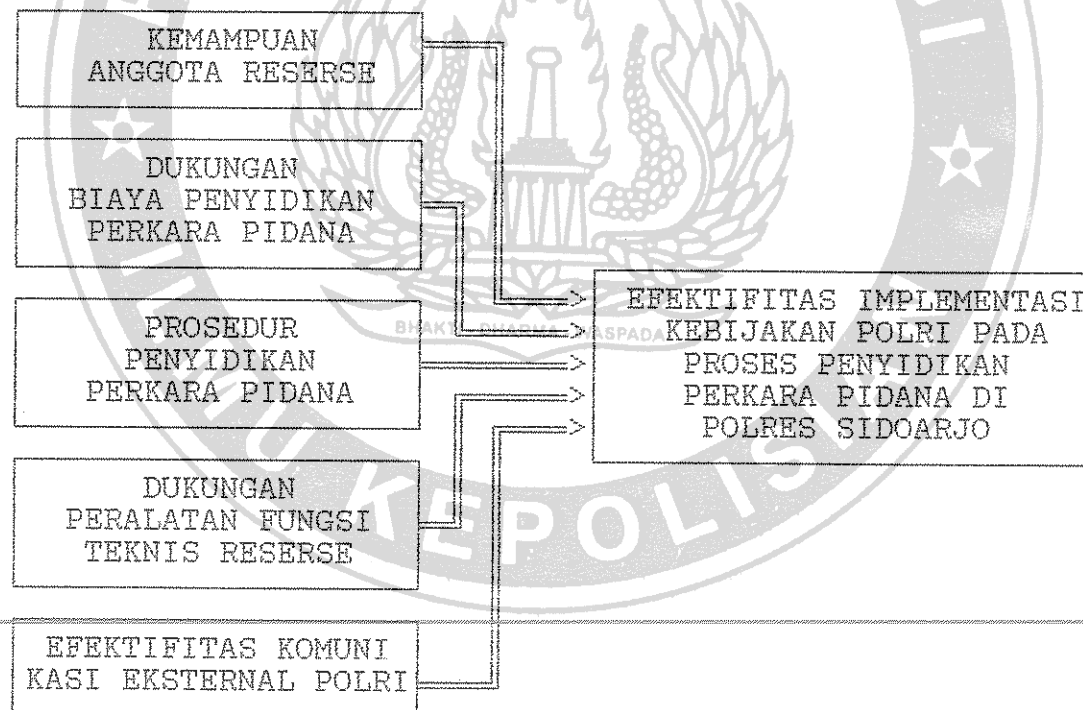
BHAKTI - DHARMA - WASPADA



Sumber : Teori Pendekatan Sistem untuk Manajemen setelah di konversikan terhadap Sistem Penyidikan di Satuan Fungsi Reserse Polres Sidoarjo.

Dihubungkan dengan judul thesis ini dan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I, maka dapat terlihat pada model Input-Output di atas, beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan, yang dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada proses penyidikan perkara pidana, yaitu pada bagian/kotak Proses Penyidikan, yang terdiri dari prosedur penyidikan, kemampuan anggota Reserse, dukungan biaya penyidikan dan peralatan. Dan kemudian yang tak kalah pentingnya sebagai faktor yang

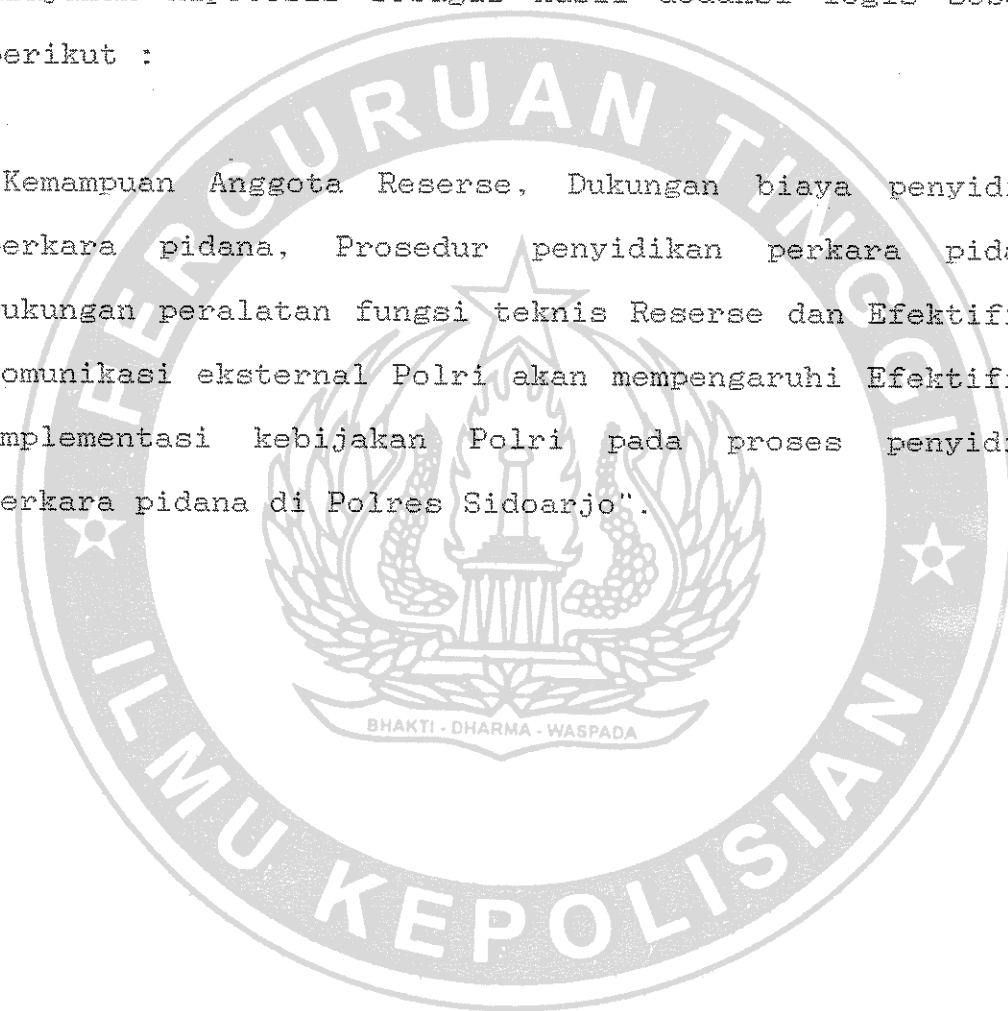
mempengaruhi adalah Sistem Komunikasi, karena dengan komunikasi output yang menjadi keluaran proses penyidikan dapat diterima oleh masyarakat luas atau terwujudnya kepercayaan terhadap Polri/Polres Sidoarjo dalam menyidik perkara pidana yang terjadi (input selanjutnya diberikan masyarakat), sehingga sistem penyidikan dapat operasional sesuai dengan fungsi dan proporsi Polri yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dan untuk lebih jelasnya dapat digambarkan secara geometris dibawah ini :



E. HIPOTESIS

Dari kerangka dasar teori-teori tersebut diatas, diajukan hipotesis sebagai hasil deduksi logis sebagai berikut :

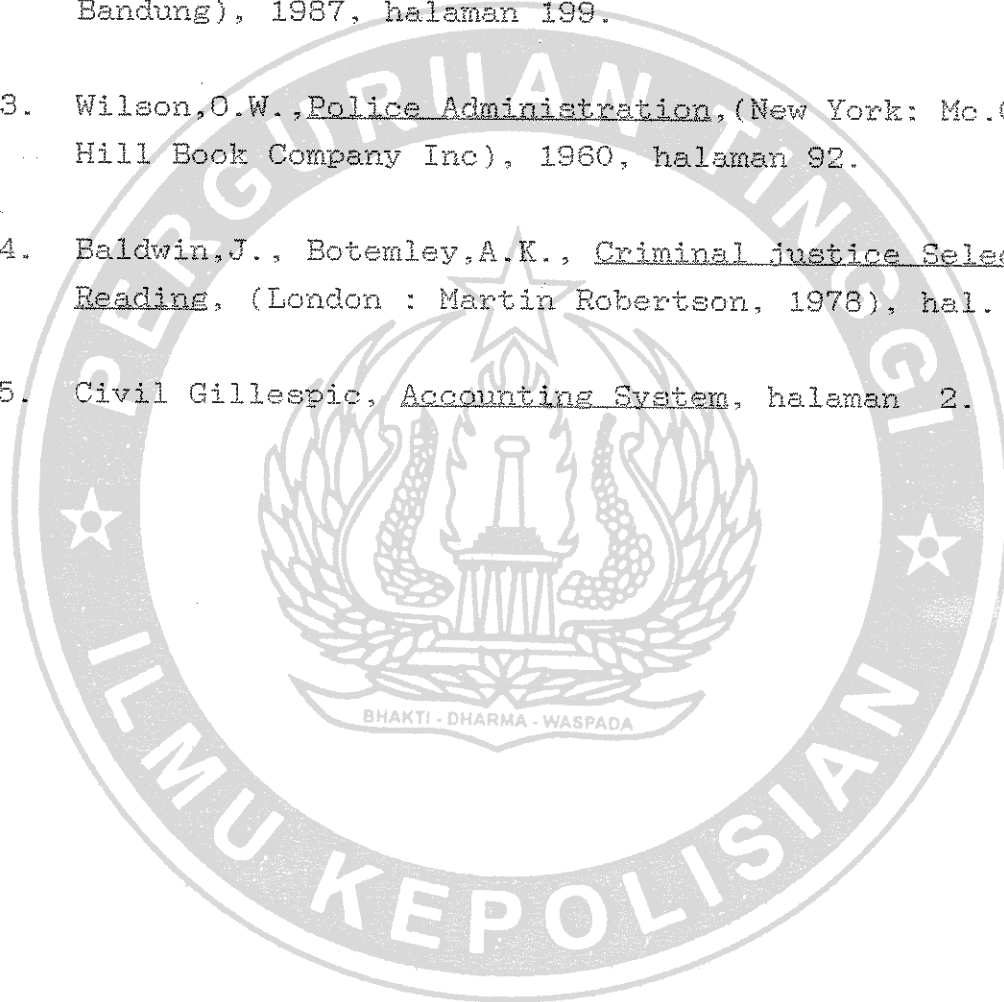
"Kemampuan Anggota Reserse, Dukungan biaya penyidikan perkara pidana, Prosedur penyidikan perkara pidana, Dukungan peralatan fungsi teknis Reserse dan Efektifitas komunikasi eksternal Polri akan mempengaruhi Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo".



CATATAN AKHIR

1. Siagian, P.S., Filsafat Administrasi, Jakarta, Gunung Agung, 1979, halaman 91.
2. Kepolisian Negara RI, Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan pokok-pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kepolisian Negara RI, Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/10/1993 tanggal 30 Oktober 1993, Pendahuluan Umum, Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri.
4. Wibawa, S., Kebijakan Public, Intermedia, 1987, halaman 36.
5. Koontz, H., Donnell, C.O., Weihrich, H., Manajemen, jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1988), halaman 68.
6. Ibid., halaman 23.
7. Koontz, H., Donnell, C.O., Weihrich, H., Manajemen, jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1990), halaman 170.
8. Ibid., halaman 170.
9. Elijah Adlow, Policeman and People, terjemahan PTIK (Boston: William J. Rochfort, 1957), halaman 18.
10. Adji, O.S., Mass Media dan Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1977), halaman 273.

11. Bonar, S.K., Hubungan Masyarakat Moderen, (Jakarta: P.T.Surungan, 1973), halaman 97.
12. Winardi, Management Information System, (Nort Bandung), 1987, halaman 199.
13. Wilson, O.W., Police Administration, (New York: Mc.Grow Hill Book Company Inc), 1960, halaman 92.
14. Baldwin, J., Botemley, A.K., Criminal justice Selected Reading, (London : Martin Robertson, 1978), hal. 37.
15. Civil Gillespic, Accounting System, halaman 2.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tujuan penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Sejauhmana efektifitas implementasi kebijakan Polri sebagaimana dituangkan dalam Kep/10/X/1993 yang dilaksanakan oleh Polres Sidoarjo pada proses penyidikan perkara pidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya". Agar tujuan penelitian ini tercapai maka metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan. Dalam mengukur tingkat efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berhubungan, dan antara yang satu dengan yang lainnya saling mempunyai ketergantungan. Oleh karenanya penulis memilih metode yang utama untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, karena dalam membuat ramalan-ramalan, dengan menggunakan metode penelitian survei dapat memakai teknik-teknik korelasi yang lebih baik.

B. Pemilihan Sampel

Berdasarkan pada pertimbangan metode penelitian yang dipilih, maka penulis melakukan pemilihan lokasi/daerah penelitian yang dijadikan objek penelitian. Dilihat dari masalah yang akan diteliti, maka ditentukan lokasi/daerah penelitian adalah daerah Polres Sidoarjo. Disamping penulis bertugas jaraknya dekat dengan objek yang diteliti yang memungkinkan penelitian dilaksanakan lebih intensif dan langsung menuju pada sasaran pokoknya, juga bila ditinjau dari keadaan Asta Gatranya, daerah ini merupakan pengembangan wilayah Surabaya yang dikenal dengan istilah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan), kecuali Kota Madya Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Bangkalan, wilayah Gerbang Kertosusila tersebut ditinjau dari kewenangan komando pengendalian dan pembinaan Kepolisian adalah dibawah Kepolisian Wilayah Surabaya.

Data perkembangan keadaan kriminalitas di Kepolisian Wilayah (Polwil) Surabaya selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 4
TREND PERKEMBANGAN KRIMINALITAS
POLWIL SURABAYA

No	KESATUAN	1990	1991	1992	1993	1994
1	POLRES GRESIK	502	632	518	335	462
2	POLRES SIDOARJO	1,705	1,441	1,086	865	797
3	POLRES MOJOKERTO	1,158	1,099	934	828	728
4	POLRES JOMBANG	985	976	929	703	665

Sumber : Polwil Surabaya (data dari laporan pelaksanaan Ops Mantap Brata III Pemilu 1992 digabungkan dengan data dari Analisa dan Evaluasi Program Kerja Polwil Surabaya TA. 1994-1995 bulan Mei 1995).

Dilihat dari trend perkembangan kriminalitas tersebut diatas, maka penulis memilih Polres Sidoarjo sebagai sampel, mengingat pada daerah tersebut bila ditinjau dari angka crime total sangat memungkinkan untuk dapat mewakili Polres lain di daerah penelitian. Pemilihan sampel tersebut dilakukan secara sengaja, tanpa menggunakan proporsi yang sama antara variabel satu dengan yang lainnya (Disproporsional random sampling). Karena penelitian ini antara lain untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Polri/Satuan fungsi reserse Polres Sidoarjo terhadap masyarakat, terutama terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam proses penyidikan perkara pidana, maka populasi sasaran tidak lain adalah anggota masyarakat, yang karakteristik (pemukiman)

populasi sasaran tidak menetap. Dasar asumsi yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan bermasalah dan memerlukan pelayanan Polri.
- b. Bentuk pelayanan disamping terhadap pelapor/korban dan tersangka yang memerlukan perlindungan hukum, dan para saksi yang memerlukan kepastian hukum.

Jumlah responden ditentukan sebanyak 60 orang terdiri dari Korban/Pelapor, Saksi dan Tersangka sebagai berikut :

Tabel 5
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

JUMLAH RESPONDEN

NO	K E L O M P O K	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tersangka	20	
2	Pelapor (Korban)	20	
3	Saksi	20	
	J U M L A H	60	

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan daftar pertanyaan, dimana dalam daftar pertanyaan tersebut berkaitan dengan hipotesis dan tujuan penelitian berupa item-item dari indikator yang ada dalam Variabel Bebas dan Variabel Tergantung. Selain daftar pertanyaan tersebut di atas, penulis juga langsung turun ke lapangan melakukan observasi dan pengumpulan dokumen dan data sekunder untuk melengkapi bahan analisa, sehingga diharapkan hasil penelitian akan lebih baik.

Cara pendistribusian daftar pertanyaan kepada para responden adalah sebagai berikut :

Responden Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perkara pidana, adalah anggota masyarakat yang berstatus dalam proses penyidikan perkara pidana sebagai Korban/ Pelapor, Saksi dan Tersangka pada periode waktu tahun 1993 sampai dengan 1995 (saat penelitian dilaksanakan), yang didapat dari catatan register/buku Laporan Polisi, register Tersangka dan register/buku Panggilan Saksi, baik perkaranya yang sudah selesai disidik (diproses) maupun yang sedang dalam proses (penyidikan). Responden dikelompokkan menurut jenis perkaranya,

sehingga bervariasi dan merata, antara lain adalah yang terlibat dalam proses penyidikan perkara pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dan penipuan, dan kemudian dilakukan pemilihan secara acak. Daftar pertanyaan diantar oleh penulis dengan didampingi oleh anggota Polres Sidoarjo sebagai penunjuk jalan, daftar pertanyaan diisi sendiri oleh responden sesuai dengan kemauan responden tanpa dipengaruhi oleh orang lain, dan ada juga yang dibantu oleh penulis bagi mereka yang kurang mampu menulis dan membaca.

Untuk memudahkan perhitungan untuk diproses dengan menggunakan rumus-rumus atau komputer dengan program SPSS/PC⁺, maka setiap variabel diberi simbol sebagai berikut :

X_1 = Respon terhadap variabel Kemampuan anggota Reserse Polres Sidoarjo.

X_2 = Respon terhadap variabel Prosedur penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo dan jajarannya.

X_3 = Respon terhadap variabel Dukungan peralatan fungsi teknis Reserse di Polres Sidoarjo dan jajarannya.

X_4 = Respon terhadap variabel Efektifitas

komunikasi eksternal tentang Polri dan pelayanan penyidikan perkara oleh Polri/Polres Sidoarjo.

Y = Respon terhadap variabel Efektifitas Implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo dan jajarannya.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah "Multiple regression dan Correlation" untuk mengetahui bagaimana pengaruh/tingkat hubungan Variabel Bebas secara serempak dan parsial terhadap Variabel Tergantung.

Guna mengetahui besarnya pengaruh dari berbagai Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung dipakai rumusan sebagai berikut :

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + e$$

Keterangan :

α = adalah inter set

β = adalah koefisien regresi dari variabel X

e = adalah variabel lain yang tidak diidentifikasi.

Sedangkan untuk mengetahui derajat signifikansinya di test dengan "F test" yang rumusnya sebagai berikut :

$$F = \frac{r^2 (n - K + 1)}{1 - r^2}$$

Apakah korelasi parsial tersebut significant, perlu ditest dengan "t test" yang rumusnya :

$$t = \frac{\text{regresion coefficient}}{\text{Satandart error of regresion coefficient}}$$

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS/PC⁺, dan setiap indikator diberi skor sebagai berikut :

- a. Bila memilih jawaban item "a" skor = 4
- b. Bila memilih jawaban item "b" skor = 3
- c. Bila memilih jawaban item "c" skor = 2
- d. Bila memilih jawaban item "d" skor = 1

Untuk keperluan interpretasi maka ditentukan batasan klasifikasi nilai sebagai berikut :

- a. .8000 - 1.0000 atau 80 % - 100 % = Tinggi
- b. .6000 - .8000 atau 60 % - 80 % = Cukup tinggi

- c. .4000 - .6000 atau 40 % - 60 % = Agak rendah
- d. .2000 - .4000 atau 20 % - 40 % = Rendah
- e. .0000 - .2000 atau 0 % - 20 % = Sangat rendah

E. Batasan Variabel

Variabel Bebas : Faktor - faktor yang mempengaruhi efektifitas Implementasi kebijakan

1. Kemampuan Anggota reserse

Kemampuan anggota reserse Polres Sidoarjo dan jajarannya adalah tingkat kemampuan anggota reserse untuk melaksanakan Kebijakan Polri yang menyangkut kualitas dan kuantitasnya.

Variabel ini dapat diukur dari dimensi :

a. Kualitas anggota reserse, hal ini dapat dilihat

dari :

- 1) Tingkat pendidikan umum terakhir yang dimiliki.
- 2) Tingkat pendidikan pertama/pengembangan Polri yang terakhir dimiliki.
- 3) Tingkat pendidikan kejuruan reserse

terakhir yang dimiliki.

- 4) Tingkat kemampuan penyelesaian perkara pidana rata-rata.
- 5) Lamanya pengalaman bertugas di fungsi teknis reserse.
- 6) Jiwa kejuangan yang penuh pengabdian dan pantang menyerah, untuk memenuhi tuntutan tugas, sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengadakan penyidikan terhadap perkara pidana.
- 7) Mutu hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas.
- 8) Kedisiplinan anggota reserse dalam melaksanakan dinas.
- 9) Kemampuan berkomunikasi dengan anggota masyarakat, baik yang terlibat dalam proses perkara pidana yang sedang ditangani maupun masyarakat lainnya.
- 10) Penghayatan dan pengamalan Kode Etik Polri dalam kehidupan sehari-hari, terutama diwaktu melaksanakan tugas penyidikan.

b. Kuantitas anggota reserse, hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Kuantitas personil anggota reserse yang

ada sesuai dengan data riil dibandingkan dengan DSPP.

2) Perbandingan kuantitas anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan dengan anggota yang siap melayani tanpa adanya pekerjaan lain yang harus didahulukan.

3) Waktu rata-rata yang diperlukan anggota reserse untuk menyelesaikan pekerjaan setiap hari.

2. Dukungan biaya penyidikan perkara pidana

★ adalah besarnya biaya penyidikan per satu perkara pidana dan yang dibutuhkan rata-rata. ★

Variabel ini tidak dilakukan pengukuran karena setelah diadakan observasi awal di lapangan, belum ada data yang mendukung berapa biaya yang dibutuhkan dalam penyidikan masing-masing perkara yang ditangani. Dari hasil wawancara yang dilakukan

dengan Perwira Kas (Pekas) 8 Polwil Surabaya tanggal 1 Mei 1995 Kapten Polisi Drs. Soekadmadi Polwil Surabaya bahwa biaya penyidikan perkara berasal dari dana APBN yang diturunkan ke Kesatuan Kewilyahan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan), dengan plafon anggaran yang telah ditentukan, dan banyaknya tidak mencukupi kebutuhan (sesuai dengan perkara

pidana yang telah ditangani), kekurangan biaya penyidikan perkara tersebut dapat ditunjang dengan dana operasional rutin untuk tindakan kepolisian, yang dapat digunakan secara fleksibel dalam prosentase tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan.

3. Prosedur penyidikan perkara pidana

adalah prosedur atau tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara pidana, yang menjadi instrumental input dan environmental input bagi proses penyidikan perkara pidana, yang mendukung terwujudnya kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Variabel ini dapat diukur dari dimensi :

a. Prosedur Formal.

1) Efektif dan efisiennya pelaksanaan penyidikan, sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas terhadap masyarakat.

2) Luwesnya prosedur untuk dilaksanakan oleh anggota reserse, sehingga dapat mendukung kualitas pelayanan Polri/anggota reserse kepada masyarakat.

b. Prosedur informal.

1) Tingkat tekanan terhadap pihak anggota reserse yang mempengaruhi kelancaran proses penyidikan perkara pidana, baik dari luar maupun dari dalam kesatuan Polres Sidoarjo, baik yang menghambat maupun yang mendukung kelancaran proses penyidikan.

2) Perbuatan diskresi anggota reserse, dalam rangka pencapaian tujuan proses penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang.

4. **Dukungan peralatan fungsi teknis reserse**

adalah dukungan peralatan fungsi teknis reserse yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara pidana yang diperlengkapi oleh dinas, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar yang mendukung terwujudnya pelayanan anggota reserse yang berkualitas terhadap masyarakat.

Variabel ini dapat diukur dari dimensi :

- a. kelengkapan peralatan sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Kelayakan peralatan untuk dihadapkan kepada

rata-rata perkara yang ditangani.

- c. Kondisi peralatan yang ada yang siap pakai.
- d. Kendala-kendala yang sering dirasakan karena perlengkapan.

5. Efektifitas komunikasi eksternal Polri

Yang dimaksudkan dengan efektifitas komunikasi eksternal Polri adalah efektifitas komunikasi eksternal yang dilakukan oleh anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo, dan efektifitas komunikasi eksternal yang dilakukan oleh personil Polres Sidoarjo lainnya atau Kapolres Sidoarjo dan satuan atas serta pihak Press kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun melalui media massa, karena komunikasi yang dilakukan oleh pihak di luar anggota reserse Polres Sidoarjo, juga akan sangat mempengaruhi citra dan akuntabilitas anggota reserse di hadapan anggota masyarakat yang dihadapinya.

Variabel ini dapat diukur dari dimensi :

- a. Kesan masyarakat terhadap Polri pada umumnya dan pada anggota reserse Polres Sidoarjo khususnya sebagai alat negara penegak hukum.

penjamin keamanan rakyat, pemelihara ketertiban masyarakat serta pembimbing, pengayom, dan pelindung masyarakat.

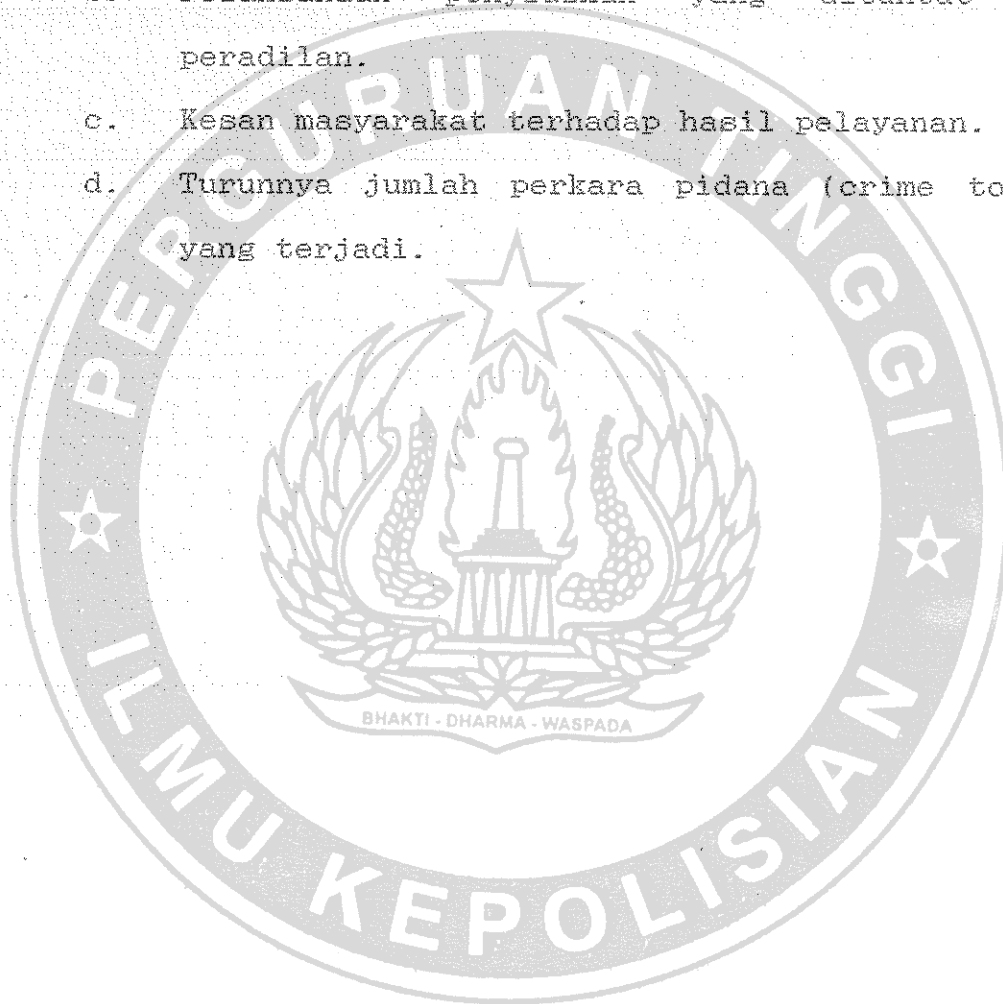
- b. Kesan terhadap berita atau informasi tentang Polri dan kriminalitas, yang disampaikan melalui media massa, yang mendukung atau yang merugikan citra Polri dihadapan masyarakat.
- c. Pemahaman tugas-tugas Polri oleh masyarakat, dalam rangka memberikan pelayanan dalam proses penyidikan perkara pidana.
- d. Pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi kepolisian sebagai pintu gerbang proses penyidikan tindak pidana sipil.
- e. Kesan masyarakat terhadap pelayanan penyidikan yang diberikan oleh anggota reserse Polres Sidoarjo, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Variabel Tergantung : Efektifitas implementasi ke
bijakan Polri pada proses
penyidikan perkara pidana

Efektifitas implementasi kebijakan Polri adalah tingkat pencapaian tujuan sesuai dengan hakekat tujuan dari kebijakan.

Variabel ini dapat diukur dari dimensi :

- a. Prosentase penyelesaian perkara pidana yang ditangani.
- b. Pelaksanaan penyidikan yang dituntut pra peradilan.
- c. Kesan masyarakat terhadap hasil pelayanan.
- d. Turunnya jumlah perkara pidana (crime total) yang terjadi.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan dan analisis serta interpretasi data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada bab III terdahulu telah dikemukakan bahwa analisis dan interpretasi data dilakukan melalui teknik statistik Multiple Regression (regresi ganda) dan Correlation (korelasi) dengan menggunakan komputer program SPSS/PC⁺. Penyajian dan penganalisaan serta interpretasi data, dilakukan sehubungan dengan hipotesis, hubungan variabel-variabel dan tujuan penelitian.

A. Penyajian dan Interpretasi Data

Respon terhadap Variabel Bebas Kemampuan anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo, Prosedur penyidikan perkara pidana, Dukungan peralatan fungsi teknis reserse, dan Efektifitas komunikasi eksternal Polri, dan Variabel Tergantung, dikumpulkan dari masyarakat melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan. Masyarakat yang dijadikan sampel adalah masyarakat yang pernah berurusan dengan jajaran Polres Sidoarjo dalam perkara pidana, baik sebagai Korban/pelapor, maupun sebagai Saksi dan Tersangka. Untuk kemudhan melihat dan menginterpretasikan

hasil respon terhadap Variabel Bebas dan Variabel Tergantung tersebut diatas, maka dibawah ini diformulasikan dalam metrik sebagai berikut :

TABEL 6
KONDISI RESPON TERHADAP VARIABEL

NO	K O N D I S I RESPON	X1 %	X2 %	X3 %	X4 %	Y %
1.	TINGGI	17 28,3 %	32 53,3 %	35 58,3 %	34 56,7 %	48 80 %
2.	CUKUP TINGGI	43 71,7 %	28 46,7 %	19 31,7 %	24 40 %	10 16,6 %
3.	AGAK RENDAH	- 0 %	- 0 %	6 10 %	2 3,3 %	2 3,3 %
4.	RENDAH	- 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
5.	SANGAT RENDAH/ TDK BERTHUBUNGAN	- 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Sumber : Jawaban pertanyaan tertulis setelah diolah pada 16 Mei 1995.

1. Respon terhadap Kemampuan anggota reserse.

Dari tabel 6 tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi respon masyarakat terhadap Variabel Bebas Kemampuan anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo, lebih mendominasi pada tingkat respon yang

"Cukup tinggi" yaitu sebesar 71,7 %, dan tingkat respon rata-ratanya juga cukup tinggi yaitu sebesar 3.0703 (lampiran 2). Hal ini berarti bahwa kemampuan anggota reserse dalam mengimplementasikan kebijakan Polri sebagaimana dituangkan pada Kep/10/X/1993 cukup memadai untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dan 28,3 % lainnya berada pada tingkat respon yang Tinggi.

2. Respon terhadap Prosedur penyidikan perkara pidana.

Dari tabel 6 tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi respon masyarakat terhadap Variabel Bebas Prosedur penyidikan perkara pidana lebih cenderung berada pada tingkat respon yang "Tinggi" yaitu sebesar 53,3 %, dan tingkat respon rata-ratanya sebesar 3.1333 atau cukup tinggi (lihat lampiran 2). Hal ini berarti bahwa pandangan masyarakat lebih banyak menilai prosedur penyidikan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik dalam proses perkara pidana. Dan 46,7 % lainnya berada pada tingkat respon yang Cukup Tinggi.

3. Respon terhadap Peralatan fungsi teknis reserse.

Dari tabel 6 tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi respon masyarakat terhadap Variabel Bebas Dukungan peralatan fungsi teknis reserse terlihat agak bervariasi, dan yang berada pada tingkat respon yang Cukup Tinggi sebanyak 31,7 % dan yang berada pada tingkat respon yang Agak rendah sebanyak 10 %, namun lebih cenderung berada pada tingkat respon yang "Tinggi", yaitu sebesar 58,3 %, dan tingkat respon rata-ratanya sebesar 3.0667 atau cukup tinggi (lihat lampiran 2). Hal ini berarti bahwa penilaian masyarakat terhadap peralatan yang mendukung proses penyidikan perkara pidana cukup baik dan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

4. Respon terhadap Efektifitas komunikasi eksternal Polri

Dari tabel 6 tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi respon masyarakat terhadap Variabel Bebas Efektifitas komunikasi eksternal Polri juga terlihat agak bervariasi, dan yang berada pada tingkat respon yang Cukup Tinggi sebanyak 40 % dan yang berada pada tingkat respon yang Agak rendah sebesar 3,3 %, namun sebagian besar berada pada

tingkat respon yang "Tinggi" yaitu sebesar 56,7 %, dan tingkat respon rata-ratanya juga tinggi yaitu sebesar 3.2635 (lampiran 2). Dalam arti kata bahwa penilaian masyarakat terhadap efektifitas komunikasi eksternal Polri dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

5. Respon terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan.

Dari tabel 6 tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi respon masyarakat terhadap Variabel Tergantung Efektifitas Implementasi Kebijakan juga bervariasi, ada yang berada pada tingkat respon yang Agak rendah, namun lebih menyolok pada tingkat respon yang "Tinggi" yaitu sebesar 80 %, dan tingkat respon rata-ratanya juga tinggi yaitu sebesar 3.4083 (lampiran 2). Dalam arti kata bahwa pelayanan pada proses penyidikan perkara yang diberikan oleh anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo berkualitas sangat baik sesuai dengan kebijakan Polri sebagaimana dituangkan dalam Kep/10/X/1993.

B. Uji Hipotesis dan Interpretasi

Dari hasil perhitungan statistik melalui teknik

Regresi dan Korelasi berganda maka didapatkan hasil sebagai berikut :

TABEL 7
REGRESI GANDA
VARIABEL BEBAS DAN VARIABEL TERGANTUNG

Page	29	SPSS/PC+	5/11/95
* * * * MULTIPLE REGRESSION * * * *			
Equation Number	1	Dependent Variable.. Y	Efektivitas Implementasi Kebijakan
Multiple R	.71948		
R Square	.51765		
Adjusted R Square	.48257		
Standard Error	.25591		
Analysis of Variance			
	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	4	3.86569	.96642
Residual	55	3.60206	.06549
F =	14.75635	Signif F =	.0000

Sumber : Hasil perhitungan dengan SPSS/PC+.

Hubungan/korelasi ganda antara Variabel Bebas Kemampuan anggota reserse, Prosedur penyidikan perkara pidana, Dukungan peralatan fungsi teknis reserse dan Efektivitas komunikasi eksternal Polri dengan Variabel Tergantung Efektivitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, dihasilkan nilai Koefisien korelasi ganda (Multiple R = .71948) $r = 0.71948$, artinya bahwa hubungan antara

Variabel Bebas dengan Variabel Tergantung berada pada taraf hubungan yang "Cukup tinggi". Untuk melihat apakah hubungan ini merupakan hubungan yang signifikan, maka dapat diuji dengan menggunakan rumusan Uji F. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan komputer ternyata mendapatkan nilai $F = 14.75635$ atau nilai Signifikan $F = .0000$, hal ini berarti bahwa dalam taraf nyata 5 % hubungan ini signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo dipengaruhi oleh Kemampuan anggota reserse, Prosedur penyidikan perkara pidana, Dukungan peralatan fungsi teknis reserse dan Efektifitas komunikasi eksternal Polri secara serempak adalah signifikan (dapat dipercaya/berarti).

Berapa besarnya pengaruh atau penjelasan yang dapat diberikan oleh Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung dapat dilihat dari besarnya Koefisien Determinasi (r^2) atau R Square = .51765, dengan artian bahwa Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh varian Kemampuan anggota reserse, Prosedur penyidikan perkara pidana, Dukungan peralatan fungsi teknis reserse dan Efektifitas

komunikasi eksternal Polri sebesar 51,765 %, dan 48,235 % lainnya diterangkan oleh variabel lain yang tidak diidentifikasi pada penelitian ini.

Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo tersebut dapat dilihat antara lain adalah dari hasil usaha Polres Sidoarjo dan jajarannya menekan meningkatnya trend perkembangan kriminalitas (crime trend) dan usaha menyelesaikan perkara pidana yang terjadi (crime Clearance) serta penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satuan fungsi Reserse Polres Sidoarjo di wilayah hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Usaha menekan trend perkembangan kriminalitas.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, anggota Reserse Polres Sidoarjo dan jajarannya mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam usaha menekan trend perkembangan kriminalitas, dengan cara melakukan tindakan represif yustisiil terhadap perkara-perkara pidana yang terjadi di wilayahnya, dan hasilnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini dengan membandingkan trend perkembangan kriminalitas sebelum dan sesudah diimplementasikan

nya kebijakan yaitu sebagai berikut :

TABEL 8
CRIME TREND
DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME TREND
1	1990	1.861	
2	1991	1.379	- 25.90 %
3	1992	1.069	- 22.48 %
4	1993	829	- 22.45 %
5	1994	794	- 4.22 %
	JUMLAH	5.932	

Sumber : Polres Sidoarjo

Catatan : Perkara tersebut diatas tidak termasuk perkara Pelanggaran dan Tindak pidana ringan.

Dari tabel tersebut diatas trend perkembangan kriminalitas di wilayah Polres Sidoarjo dari tahun ke tahun terlihat menurun dengan tajam, terutama pada tahun 1993 dan tahun 1994 setelah kebijakan Polri tentang peningkatan kualitas pelayanan diimplementasikan, dan terlihat jumlah kejahatan (crime total) kurang dari 1000 perkara/tahun, bila dibandingkan dengan periode tahun 1990 sampai dengan tahun 1992 sebelum pengimplementasian kebijakan tentang peningkatan kualitas pelayanan, maka crime

total lebih dari 1000 perkara/tahun. dari uraian tentang usaha menekan peningkatan trend perkembangan kriminalitas oleh fungsi reserse Polres Sidoarjo dan jajarannya dapat berhasil dengan baik.

2. Usaha peningkatan penyelesaian perkara pidana,

Usaha peningkatan penyelesaian perkara pidana oleh Satuan Fungsi Reserse Polres Sidoarjo dan jajarannya, menurut hasil wawancara dengan para Perwiranya, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan anggota dalam penyidikan, khususnya dalam penyelesaiannya melalui pembinaan fungsi reserse setiap minggu, pengendalian dan pengawasan melekat tentang penyelesaian perkara yang dilakukan secara berjenjang, baik dari satuan atas maupun para Perwira di jajaran satuan fungsi reserse di Polres Sidoarjo, selain mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti pendidikan kejuruan fungsi reserse. Trend perkembangan penyelesaian perkara pidana tersebut pada periode waktu 5 tahun sebelum penelitian dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 9
CRIME CLEARANCE TREND
DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

NO.	TAHUN	CRIME CLEARANCE	TREND
1.	1990	1020	- 43.14 %
2.	1991	580	+ 43.45 %
3.	1992	832	- 39.30 %
4.	1993	505	+ 39.00 %
5.	1994	702	

Sumber : Polres Sidoarjo

Dari tabel tersebut di atas, secara umum tingkat penyelesaian perkara pidana (crime clearance trend) terlihat turun naik, namun bila kita lihat pada periode waktu sebelum kebijakan tentang peningkatan pelayanan Polri pada proses penyidikan perkara pidana tahun 1990 sampai tahun 1992 cenderung menurun, dan pada periode waktu tahun 1993 dan tahun 1994 setelah kebijakan diimplementasikan cenderung meningkat.

Dari uraian tentang usaha peningkatan penyelesaian perkara pidana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Reserse jajaran Polres Sidoarjo berhasil meningkatkan penyelesaian perkara

pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.

Tingkat penyelesaian perkara pidana tersebut dapat dilihat dengan membandingkan Crime Total dengan Crime Clearance yaitu sebagai berikut :

TABEL 10
PROSENTASE PENYELESAIAN PERKARA
DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE	RATE
1	1990	1.861	1.020	54.80 %
2	1991	1.379	580	42.06 %
3	1992	1.069	832	77.83 %
4	1993	829	505	60.92 %
5	1994	794	702	88.41 %
	JUMLAH	5.932	3.639	61.35 %

Sumber : Polres Sidoarjo

- Usaha peningkatan kualitas pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Berhasil atau tidaknya anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas terhadap masyarakat, yang berhadapan langsung atau yang terlibat dalam proses

penyidikan perkara pidana baik sebagai Korban/ pelapor, Saksi, ataupun sebagai Tersangka, sangat bervariasi dan datanya dapat kita lihat dari hasil pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan dalam penelitian terhadap sampel (nilai rata-rata/mean variabel Y) sebesar 3.4083 (lihat lampiran 2), sedangkan nilai tertinggi rata-rata masing-masing variabel sebagaimana ditentukan pada Instrumen Penelitian pada Bab III adalah dengan skor 4 (empat), maka prosentase nilai keberhasilan pelayanan anggota reserse Polres Sidoarjo yang diberikan oleh masyarakat adalah 85.21 % atau dengan tingkat respon yang tinggi.

C. Korelasi Masing-masing Variabel Bebas terhadap variabel Tergantung

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan teknik statistik Korelasi, maka dapat dilihat korelasi masing-masing variabel Bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) dengan variabel Tergantung (Y) yaitu sebagai berikut :

TABEL 11
KORELASI Masing-masing VARIABEL BEBAS
DENGAN VARIABEL TERGANTUNG

Page	23	SPSS/PC+	5/11/95		
Correlations:	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y
X ₁	1.0000	.1371	.0841	.1753	.3155*
X ₂	.1371	1.0000	.4250**	.2671	.5461**
X ₃	.0841	.4250**	1.0000	.3213*	.6008**
X ₄	.1753	.2671	.3213*	1.0000	.2648
Y	.3155*	.5461**	.6008**	.2648	1.0000
N of cases:	60	1-tailed Signif: * - .01 ** - .001			

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Sumber : Hasil perhitungan dengan SPSS/PC⁺.

1. Korelasi Kemampuan anggota reserse (X₁) dengan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo (Y) di dapatkan nilai Koefisien korelasi sebesar $r = .3155$. Hal ini berarti hubungan tersebut berada pada taraf hubungan yang "Rendah". Untuk melihat apakah hubungan ini signifikan dapat dilakukan dengan menggunakan Uji "T", hasil perhitungan komputer menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan (*) dalam taraf nyata 5 % dan dapat diterima.
2. Korelasi Prosedur penyidikan perkara pidana (X₂) dengan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada

proses penvidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo (Y) didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r = .5461$. Hal ini berarti hubungan tersebut berada pada taraf hubungan yang "Agak rendah". Untuk melihat apakah hubungan ini signifikan dapat dilakukan dengan menggunakan Uji T, hasil perhitungan komputer menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan (**) dalam taraf nyata 5 % dan dapat diterima.

3. Korelasi Dukungan peralatan fungsi teknis reserse (X_3) dengan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penvidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo (Y) didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r = .6008$. Hal ini berarti hubungan tersebut berada pada taraf hubungan yang "Cukup tinggi". Untuk melihat apakah hubungan ini signifikan dapat dilakukan dengan menggunakan Uji T, hasil perhitungan komputer menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan (**) dalam taraf nyata 5 % dan dapat diterima.

4. Korelasi Efektifitas komunikasi eksternal Polri (X_4) dengan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses perkara pidana di Polres Sidoarjo (Y) didapat

kan nilai koefisien korelasi sebesar $r = .2648$. Hal ini berarti hubungan tersebut berada pada taraf hubungan yang "Rendah". Untuk melihat apakah hubungan ini signifikan, dapat dilakukan dengan menggunakan Uji T, hasil perhitungan komputer menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan dalam taraf nyata 5 % dan tidak dapat diterima.

D. Kontribusi Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung

Kontribusi/besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas dapat dilihat dari nilai koefisien regresi β masing-masing Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung, dibawah ini disajikan sampai dimana tingkat pengaruh/kontribusi masing-masing Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung sebagai berikut :

TABEL 12
KONTRIBUSI VARIABEL BEBAS
TERHADAP VARIABEL TERGANTUNG

Page 30 SPSS/PC+ 5/11/95

* * * * MULTIPLE REGRESSION * * * *

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementas
Kebijakan

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	Correl
X ₄	-.006640	.106148	-.006323	.264817
X ₁	.398585	.162458	.234443	.315508
X ₂	.412296	.182586	.326855	.546086
X ₃	.396792	.095159	.444188	.600795
(Constant)	-.302537	.604454		

Variable	Part Cor	Partial
X ₄	-.005858	-.008434
X ₁	.229762	.314084
X ₂	.291213	.386688
X ₃	.390490	.490098

Page 31 SPSS/PC+ 5/11/95

* * * * MULTIPLE REGRESSION * * * *

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementasi
Kebijakan

----- Variables in the Equation -----

Variable	Tolerance	VIF	T	Sig T
X ₄	.858137	1.165	-.063	.9504
X ₁	.960465	1.041	2.453	.0173
X ₂	.793802	1.260	3.110	.0030
X ₃	.772833	1.294	4.170	.0001
(Constant)			-.501	.6187

End Block Number 1 All requested variables entered.

Sumber : Hasil perhitungan dengan SPSS/PC+.

1. Kontribusi atau besarnya pengaruh Kemampuan anggota Reserse terhadap Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo didapatkan koefisien regresi $\beta_1 = .398585$, dengan arti bahwa setiap perubahan 1 (satu) nilai Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, akan terjadi perubahan terhadap Kemampuan anggota reserse sebesar .398585. Dan kontribusi tersebut berada pada taraf hubungan yang "Rendah", walaupun demikian kontribusinya menentukan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo karena dilihat dari nilai $T > \text{Sig } T$.
2. Kontribusi atau besarnya pengaruh Prosedur penyidikan perkara pidana terhadap Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo didapatkan nilai koefisien regresi $\beta_2 = .412296$, dengan arti bahwa setiap perubahan 1 (satu) nilai Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, akan terjadi perubahan terhadap Prosedur penyidikan perkara pidana sebesar .412296. Dan kontribusi tersebut

berada pada taraf hubungan yang *Agak rendah*, walaupun demikian kontribusinya menentukan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo karena dilihat dari nilai $T > \text{Sig } T$.

3. Kontribusi atau besarnya pengaruh Dukungan peralatan fungsi teknis reseerse terhadap Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo didapatkan nilai koefisien regresi $\beta_3 = .396792$, dengan arti bahwa setiap perubahan 1 (satu) nilai Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, akan terjadi perubahan terhadap Dukungan peralatan fungsi teknis reseerse sebesar .396792. Dan kontribusi tersebut berada pada taraf hubungan "*Rendah*", akan tetapi kontribusinya menentukan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo karena dilihat dari nilai $T > \text{Sig } T$.

4. Kontribusi atau besarnya pengaruh Efektifitas komunikasi eksternal Polri terhadap Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan

perkara pidana di Polres Sidoarjo didapatkan nilai koefisien regresi $\beta_4 = -.006640$, dengan arti bahwa setiap perubahan 1 (satu) nilai Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, akan terjadi perubahan terhadap Efektifitas komunikasi eksternal Polri sebesar $-.006640$. Dan kontribusi ini tidak menentukan Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, karena dilihat dari nilai $T < \text{Sig } T$.

★ Karena nilai koefisien regresi β_4 "negatif", maka hubungan atau pengaruh Efektifitas komunikasi eksternal Polri terhadap Efektifitas implementasi Kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo tidak mendukung, sehingga dengan posisi atau keadaan Efektifitas komunikasi eksternal Polri sekarang ini mengganggu pencapaian efektifitas. Menurut hasil pengamatan penulis di lapangan, hal ini dapat terjadi antara lain karena belum tepatnya atau sesuainya teknik komunikasi eksternal yang digunakan, terutama masalah yang menyangkut informasi paling tidak disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Informasi eksternal Polri sering menampilkan sosok Polri yang kurang mandiri dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga mengurangi akuntabilitas atau kurang profesionalnya Polri melakukan tugas-tugas kepolisian yang dipercayakan kepadanya.
- b. Informasi eksternal Polri terutama informasi kriminalitas, banyak bersifat hal-hal yang menonjol saja, dan hanya menonjolkan prestasi Polri.
- c. Masih seringnya Informasi eksternal tentang Polri, yang secara tersirat dapat berarti melecehkan wibawa Polri sebagai alat negara penegak hukum yang bertindak berdasarkan hukum.

Dengan keadaan tersebut di atas, dapat menyebabkan kekeliruan pemahaman peran dan fungsi Polri oleh konsumen pelayanan jasa Polri, yang berada pada tingkat paling besar dalam masyarakat, sangat jarang adanya informasi untuk mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat lapisan bawah, dengan pengertian bahwa Polri sebagai alat negara penegak hukum (law enforcement), sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (public order), sebagai pengayom, pembimbing dan pelindung masyarakat (public

service), memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang status dan golongan serta intensitas perkara yang dialami masyarakat. Dampak yang dapat terjadi adalah pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi Polri hanya menangani kasus-kasus besar saja, atau melayani golongan masyarakat lapisan tertentu saja.

Akibat ketidak berdayaan Polri menghadapi pelecehan terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adlow (1957), dapat berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap Kesatuan Polri, sebagai suatu kesatuan yang lemah dan kurang berwibawa sebagai penyelenggara tugas-tugas kepolisian, sehingga timbul kurangpercayaan masyarakat kepada kualitas jasa pelayanan Polri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang mempengaruhi Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo.
- b. Dukungan biaya penidikan perkara pidana.
- c. Prosedur penidikan perkara pidana.
- d. Dukungan peralatan fungsi teknis reserse.
- e. Efektifitas komunikasi eksternal Polri.

Kemudian setelah diadakan analisa dan interpre tasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo tersebut, dapat memberi dukungan dan membuktikan bahwa adanya kebenaran terhadap Hipotesis yang diajukan. Dilihat dari pola hubungan dan besarnya pengaruh serta kekuatan ramalan dari faktor-faktor yang dijadikan variabel-variabel untuk diperhitung

kan bahwa variabel-variabel Kemampuan anggota reserse, Prosedur penyidikan perkara pidana, Dukungan peralatan fungsi teknis reserse, dan Efektifitas komunikasi eksternal Polri mempengaruhi variabel Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo sebesar 51,762 %. Dilihat dari besarnya angka ini menurut standar penelitian ilmu sosial maka hasil ini berada pada taraf yang Agak rendah dalam memberikan pengaruh terhadap Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, sedangkan 48,238 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diidentifikasi dalam penelitian ini. Dan setelah diadakan Uji F, maka hubungan ini signifikan pada taraf nyata 5 % dan dapat dipercaya kebenarannya.

2. Kalau dilihat dari pola hubungan dan besarnya pengaruh dan kontribusi serta kekuatan ramalan dari masing-masing variabel yang diperhitungkan dalam mempengaruhi variabel Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo, terbukti bahwa variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh dan kontribusi yang berbeda terhadap Efektifitas implementasi

kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

- a. Variabel kemampuan anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo mempengaruhi variabel Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo sebesar 39,8585 %. Dan hal ini masih dalam taraf kontribusi yang *Rendah*.
- b. Variabel Prosedur penyidikan perkara pidana mempengaruhi variabel Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo sebesar 41.2296 %. Dan hal ini berada pada taraf hubungan yang *Agak rendah*.
- c. Variabel dukungan peralatan fungsi teknis reserse mempengaruhi variabel Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo sebesar 39,6792 %. Dan hal ini berada pada taraf hubungan yang *Rendah*.
- d. Variabel efektifitas komunikasi eksternal Polri

mempunyai pengaruh "*Negatif*" atau menghambat terhadap variabel Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan perkara pidana di Polres Sidoarjo sebesar 0.6640 % , dipersepsikan hal ini dapat terjadi karena masih kurang tepatnya Sistem Komunikasi yang digunakan, atau dengan kata lain bahwa sistem komunikasi yang digunakan belum searah dan menunjang tujuan dari kebijakan tersebut dalam Kep/10/X/1993.

B. Saran-saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas Polri/Polres Sidoarjo dalam melaksanakan proses penyidikan perkara pidana, perlu adanya peningkatan intervensi pimpinan yang mempunyai otoritas kewenangan terhadap pembangunan dan pembinaan kemampuan operasional Polri/Polres Sidoarjo, agar kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas implementasi segala bentuk kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian mencapai taraf yang tinggi. Sebagai obyek yang terpenting disini adalah tentang perlunya renovasi dan reformasi faktor-faktor yang mendukung Efektifitas implementasi kebijakan Polri pada proses penyidikan

perkara pidana di Polres Sidoarjo, kemungkinan beberapa saran yang akan penulis ajukan ini sudah sering pula diajukan dalam setiap laporan-laporan pelaksanaan tugas oleh Polres Sidoarjo, namun karena belum adanya realisasi yang memadai, maka hal ini sudah menjadi usang di kalangan kesatuan Polri, khususnya Polres Sidoarjo.

Dalam kesempatan ini penulis mencoba mengajukan beberapa saran dengan argumentasi yang sederhana sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan responsibilitas Polres Sidoarjo terhadap tuntutan masyarakat pada jasa pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada era modernisasi ini, maka perlu diprioritaskan perwujudan kemampuan sumberdaya Polri baik kualitasnya maupun kuantitasnya, sehingga mampu dihadapkan pada tantangan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Sesuai dengan hal yang telah digariskan dalam arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam Rencana Strategi Pertahanan dan Keamanan IV tahun 1989-1994, bahwa upaya peningkatan modernisasi Abri/Polri diperlukan untuk mengikuti perkembangan agar tidak ketinggalan. Menurut hasil

pengamatan di lapangan bahwa telah banyak dilakukan sebagai upaya terobosan oleh para pimpinan Kesatuan Polres Sidoarjo dari tingkat pimpinan paling atas (Kapolres) sampai tingkat pimpinan terbawah (Kapolsek, Kasat, Ka unit), dan bahkan oleh seluruh anggota reseerse jajaran Polres Sidoarjo untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya, dan hasilnya telah banyak fakta yang dapat dilihat dan dirasakan sebagai efek (akibat baik) dari upaya terobosan-terobosan tersebut, namun kemungkinan timbulnya dampak (akibat buruk) dari pada upaya terobosan tersebut tentu selalu ada, dan hal itu belum pernah dievaluasi secara rinci. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas Polres Sidoarjo, perlu adanya prioritas untuk pembangunan dan pembinaan kemampuan operasional fungsi reseerse ini, agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar yang bersifat substansial baik terhadap Polres Sidoarjo maupun terhadap Polri.

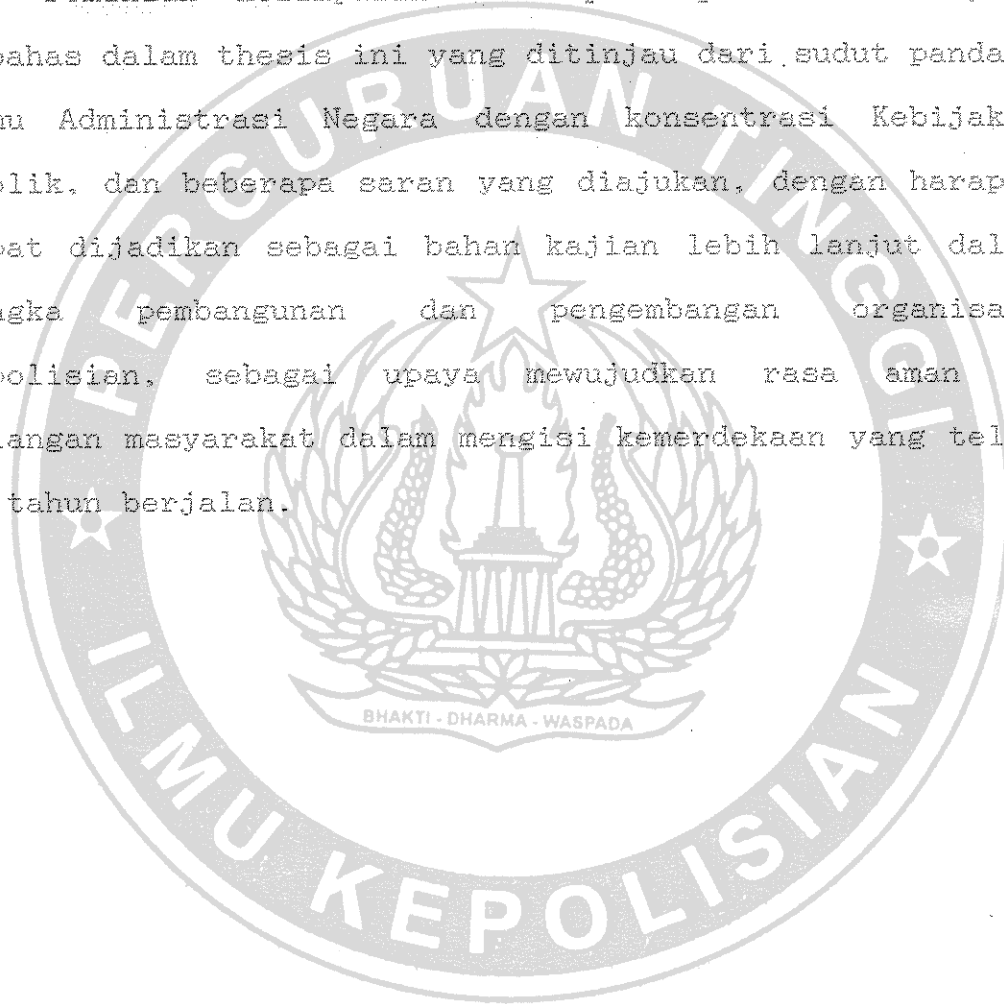
- b. Dalam rangka peningkatan profesionalisme kepolisian, perlu adanya pengkajian kembali secara mendasar tentang prosedur dan teknis

penvidikan perkara pidana sebagai landasan berpijak tindakan kepolisian, agar dapat mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat diwujudkan secara nyata. Dan perlu juga dipikirkan dan diwujudkan tentang hal-hal yang dapat melindungi profesionalisme kepolisian dan kewibawaan Polri sebagai alat negara penegak hukum, karena pengembangan profesionalisme dan kewibawaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sikap dan perilaku para anggota Polri, tetapi lebih banyak ditentukan oleh bagaimana hukum atau perundang-undangan yang mendasari dan melindunginya.

- c. Dalam rangka meningkatkan adaptabilitas kepolisian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap jasa pelayanan Polri, perlu dikembangkan sistem komunikasi eksternal Polri, agar tindakan dan usaha yang dilakukan Polri dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan hakekat tujuan tugas pokoknya, dapat memberikan rasa aman terhadap pribadi-pribadi masyarakat secara

adil dan merata sebagaimana yang terkandung dalam Kode Etik Polri.

Demikian kesimpulan dari pada permasalahan yang dibahas dalam thesis ini yang ditinjau dari sudut pandang Ilmu Administrasi Negara dengan konsentrasi Kebijakan Publik, dan beberapa saran yang diajukan, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pembangunan dan pengembangan organisasi Kepolisian, sebagai upaya mewujudkan rasa aman di kalangan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan yang telah 50 tahun berjalan.



KEPUSTAKAAN

- Adelman, I., Morris, C.T., Economical Growth and Social Equity in Developing Countries, California: Stanford University Press, 1977, dalam buku, Pembangunan Dasar-dasar dan Pengertiannya, Ryadi, SAL.
- Adji, O.S., Mass Media dan Hukum, Jakarta: Erlangga, 1977.
- Adlow, E., Policeman and People, terjemahan PTIK, Boston: William J. Rochfort, 1957.
- Atmadja, R.S.S., Tri Brata, Subarkah: Mintaraga, 1969.
- Baldwin, J., Botemley, A.K., Criminal justice Selected Reading, London: Martin Robertson, 1978.
- Bonar, S.K., Hubungan Masyarakat Moderen, Jakarta: P.T. Surungan, 1973.
- Brotodiredjo, S., Tugas Kepolisian Negara RI Dalam Undang-undang, Bandung: Langlang Buana, 1987.
- Civil Gillespie, Accounting System.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan, Dokumen Perencanaan Strategi Pertahan dan Keamanan, tahun 1989-1994.
- Goulet, Denis, The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development, New York: Atheneum, 1973.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Indonesian Police, Jakarta: Gramedia, 1993.

Koontz, H., Donnell, C.O., Weihrich, H., Manajemen, jilid 1, Jakarta: Erlangga, 1988.

Koontz, H., Donnell, C.O., Weihrich, H., Manajemen, jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1990.

Maslow, A., Motivation and Personality, New York: Harper & Brother, 1954.

Moeljarto, T., Politik Pembangunan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

Reckless, W.C., The Crime Problem, New York, 1961.

Satjipto, R., Kompas, 19 September 1994.

Siagian, S.P., Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung, 1979.

Soejono, D., Pelita, 23 Desember 1991.

Soekanto, S., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Steers, R.M., Efektifitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1984.

Thoha, M., Pembinaan Organisasi, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Wibawa, S., Kebijakan Public, Intermedia, 1987.

Wilson, O.W., Police Administration, New York: Mc.Grow Hill Book Company Inc, 1960.

Winardi, Management Information System, Nort: Bandung, 1987.



DAFTAR NILAI RESPON
DALAM RANGKA PENELITIAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN POLRI PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
DI POLRES SIDOARJO

NOMOR RESPONDEN	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y
1.	3.20	3.40	3.25	3.33	3.75
2.	2.70	3.40	3.25	3.00	3.63
3.	2.80	3.40	3.25	3.66	3.50
4.	2.90	3.00	3.25	3.00	3.38
5.	3.30	3.00	3.50	3.33	3.50
6.	3.10	2.40	3.75	2.83	3.38
7.	3.40	3.80	3.25	3.50	3.75
8.	3.20	3.80	3.50	3.83	3.75
9.	2.90	3.20	2.75	3.33	3.38
10.	2.90	3.20	3.00	3.33	3.00
11.	3.10	3.20	3.00	3.17	3.00
12.	3.50	3.20	3.25	3.83	3.75
13.	2.90	3.20	3.25	3.33	3.50
14.	3.10	3.00	3.25	3.50	3.63
15.	2.80	3.00	3.25	3.50	3.63
16.	3.10	3.00	3.25	3.50	3.63
17.	3.40	3.00	2.00	3.00	3.50
18.	2.90	3.20	3.25	3.33	3.13
19.	3.40	3.20	3.25	3.17	3.38
20.	3.20	3.20	3.25	3.17	3.25
21.	3.10	2.80	3.25	3.33	3.50
22.	3.00	2.80	3.25	3.17	3.63
23.	2.90	3.00	3.25	3.00	3.38
24.	3.10	3.00	3.00	3.00	3.50
25.	3.00	3.60	3.50	2.33	3.88
26.	3.00	2.60	2.25	3.33	2.25
27.	2.80	2.80	2.25	3.33	2.38

28.	2.90	2.40	2.25	3.33	2.50
29.	3.10	3.00	2.75	3.33	3.13
30.	3.10	3.20	3.00	3.00	3.63
31.	3.10	3.20	2.50	3.17	3.50
32.	3.00	3.00	2.50	2.83	2.88
33.	3.40	3.20	2.65	3.83	3.75
34.	2.90	3.00	3.25	3.00	3.88
35.	3.00	3.00	3.25	3.50	3.63
36.	3.10	3.00	3.25	3.00	3.50
37.	3.30	3.00	3.25	3.00	3.50
38.	3.20	3.00	2.75	2.83	3.00
39.	2.80	3.20	3.25	3.67	3.75
40.	3.00	3.00	3.00	3.33	3.38
41.	3.00	3.20	3.50	3.17	3.50
42.	3.20	3.20	3.00	3.33	3.25
43.	3.00	2.80	3.00	3.00	3.25
44.	3.00	3.20	3.25	3.00	3.25
45.	3.00	3.20	3.00	2.33	3.38
46.	3.20	3.80	3.50	3.67	3.63
47.	3.50	3.40	3.75	4.00	3.88
48.	3.50	3.40	3.75	4.00	4.00
49.	3.00	3.00	2.75	3.00	2.88
50.	3.10	2.80	2.75	3.17	2.88
51.	3.00	3.00	2.75	3.00	3.00
52.	3.10	3.40	3.25	3.17	3.50
53.	2.80	3.20	3.00	3.33	3.63
54.	3.10	3.00	3.25	3.50	3.63
55.	3.50	3.40	3.25	3.33	3.75
56.	3.30	3.00	2.25	2.67	3.50
57.	2.80	3.20	3.25	3.50	3.50
58.	3.00	3.20	2.50	3.50	3.63
59.	2.70	3.40	3.25	3.50	3.38
60.	2.70	3.40	3.25	3.50	3.38

Proses data tanggal 5 Mei 1995 di Polwil Surabaya.

KETERANGAN

- X₁ = RESPON TERHADAP KEMAMPUAN ANGGOTA RESERSE
X₂ = RESPON THD PROSEDUR PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
X₃ = RESPON TERHADAP PERALATAN FUNGSI RESERSE
X₄ = RESPON TERHADAP KOMUNIKASI EKSTERNAL POLRI
Y = RESPON THD EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



LAMPIRAN 2

HASIL PERHITUNGAN STATISTIK
DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER
PROGRAM SPSS/PC+

Include 'B:HARISON'.
Title "Penelitian Efektifitas Implementasi Kebijakan "
Subtitle "Di Polres Sidoarjo".
WARNING 313. Text: SUBTITLE
UNEXPECTED SYMBOOL ON TITLE COMMAND--Something occurs
after a closing apostrophe and is ignored. Check for
a missing command terminator.
Data list /X₁ 1-4 X₂ 6-9 X₃ 11-14 X₄ 16-19 Y 21-24
Variable labels
X₁ "Kemampuan Anggota Reserse"
/X₂ "Prosedur Penyidikan Perkara"
/X₃ "Dukungan Peralatan Fungsi Reserse"
/X₄ "Efektifitas Komunikasi Eksternal POLRI"
/Y "Efektivitas Implementasi Kebijakan".
Begin data.
End data.
60 cases are written to the uncompressed active file.
This procedure was completed at 10:30:00
Correlation variables=X₁ X₂ X₃ X₄ Y
/Options=2
/Statistics=all.

Page 22 SPSS/PC+ 5/11/95

Variable	Cases	Mean	Std Dev
X ₁	60	3.0703	.2093
X ₂	60	3.1333	.2820
X ₃	60	3.0667	.3983
X ₄	60	3.2635	.3388
Y	60	3.4083	.3558

Page 23 SPSS/PC+ 5/11/95

Correlations:	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y
X ₁	1.0000	.1371	.0841	.1753	.3155*
X ₂	.1371	1.0000	.4250**	.2671	.5461**
X ₃	.0841	.4250**	1.0000	.3213*	.6008**
X ₄	.1753	.2671	.3213*	1.0000	.2648
Y	.3155*	.5461**	.6008**	.2648	1.0000

N of cases: 60 1-tailed Signif: * - .01 ** - .001

" ." is printed if a coefficient cannot be computed

Page 24 SPSS/PC+ 5/11/95

This procedure was completed at 10:33:17
 REGRESSION /VARIABLES X₁ X₂ X₃ X₄ Y /DESCRIPTIVES DEFAULT
 /stat=defa zpp tol history
 /DEPENDENT Y /METHOD
 back /RESIDUALS defa DURBIN.

Page 25 SPSS/PC+ 5/11/95

***** MULTIPLE REGRESSION *****

Listwise Deletion of Missing Data

	Mean	Std Dev	Label
X ₁	3.070	.209	Kemampuan Anggota Reserse
X ₂	3.133	.282	Prosedur Penyidikan Perkara Pidana
X ₃	3.067	.398	Dukungan Peralatan Fungsi Reserse
X ₄	3.263	.339	Komunikasi Eksternal POLRI
Y	3.408	.356	Efektivitas Implementasi Kebijakan
N of Cases =	60		

Page 26 SPSS/PC+ 5/11/95

***** MULTIPLE REGRESSION *****

Correlation:

	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y
X ₁	1.000	.137	.084	.175	.316
X ₂	.137	1.000	.425	.267	.546
X ₃	.084	.425	1.000	.321	.601
X ₄	.175	.267	.321	1.000	.265
Y	.316	.546	.601	.265	1.000

Page 27 SPSS/PC+ 5/11/95

***** MULTIPLE REGRESSION *****

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementasi
Kebijakan

Block Number 1. Method: Enter

Page 28 SPSS/PC+ 5/11/95

***** MULTIPLE REGRESSION *****

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementasi
Kebijakan

Variable(s) Entered on Step Number

1..	X ₄	Komunikasi Eksternal POLRI
2..	X ₁	Kemampuan Anggota Reserse
3..	X ₂	Prosedur Penyidikan Perkara
4..	X ₃	Dukungan Peralatan Fungsi Reserse

Page 29 SPSS/PC+ 5/11/95

***** MULTIPLE REGRESSION *****

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementasi
Kebijakan

Multiple R .71948
R Square .51765
Adjusted R Square .48257
Standard Error .25591

Analysis of Variance

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	4	3.86569	.96642
Residual	55	3.60206	.06549

F = 14.75635 Signif F = .0000

Page 30 SPSS/PC+ 5/11/95

***** MULTIPLE REGRESSION *****

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementasi
Kebijakan

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	Correl
X ₄	-.006640	.106148	-.006323	.264817
X ₁	.398585	.162458	.234443	.315508
X ₂	.412296	.132586	.326855	.546086
X ₃	.396792	.095159	.444188	.600795
(Constant)	-.302537	.604454		

Variable	Part Cor	Partial
X ₄	-.005858	-.008434
X ₁	.229762	.314084
X ₂	.291213	.386688
X ₃	.390490	.490096

Page 31 SPSS/PC+ 5/11/95

***** MULTIPLE REGRESSION *****

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementasi
Kebijakan

----- Variables in the Equation -----

Variable	Tolerance	VIF	T	Sig T
X ₄	.858137	1.165	-.063	.9504
X ₁	.960465	1.041	2.453	.0173
X ₂	.793802	1.260	3.110	.0030
X ₃	.772833	1.294	4.170	.0001
(Constant)			-.501	.6187

End Block Number 1 All requested variables entered.

Page 36 SPSS/PC+ 5/11/95

*** MULTIPLE REGRESSION ***

Equation Number 1 Dependent Variable.. Y Efektivitas
Implementasi
Kebijakan

Residuals Statistics:

	Min	Max	Mean	Std Dev	N
*PRED	2.7182	3.9587	3.4083	.2560	60
*RESID	-.5882	.5169	.0000	.2471	60
*ZPRED	-2.7038	2.1506	.0000	1.0000	60
*ZRESID	-2.3190	2.0381	.0000	.9742	60

Total Cases = 60

Durbin-Watson Test = 1.48442

Page 37 SPSS/PC+ 5/11/95

Outliers - Standardized Residual

Case #	*ZRESID
26	-2.31899
34	2.03805
27	-1.83641
58	1.73916
17	1.72445
11	-1.66033
56	1.49130
37	1.49130
39	1.37677
10	-1.34717

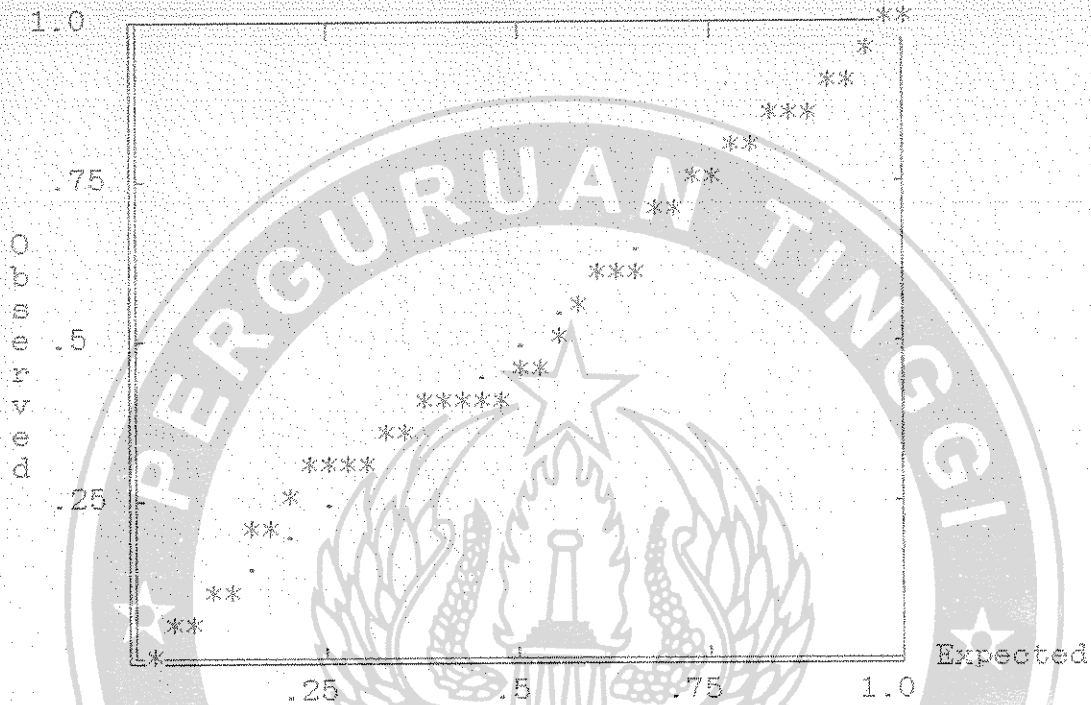
Histogram - Standardized Residual

NExp N (* = 1 Cases. . : = Normal Curve)

0	.05	Out	
0	.09	3.00	
0	.23	2.67	
0	.54	2.33	
1	1.09	2.00	:
2	2.01	1.67	*
5	3.29	1.33	**:**
3	4.84	1.00	***
8	6.37	.67	*****:**
8	7.52	.33	*****:
8	7.94	.00	*****:
6	7.52	-.33	*****
5	6.37	-.67	*****
7	4.84	-1.00	***:**
4	3.29	-1.33	**:**
1	2.01	-1.67	*
1	1.09	-2.00	:
1	.54	-2.33	:
0	.23	-2.67	
0	.09	-3.00	
0	.05	Out	



Normal Probability (P-P) Plot
Standardized Residual

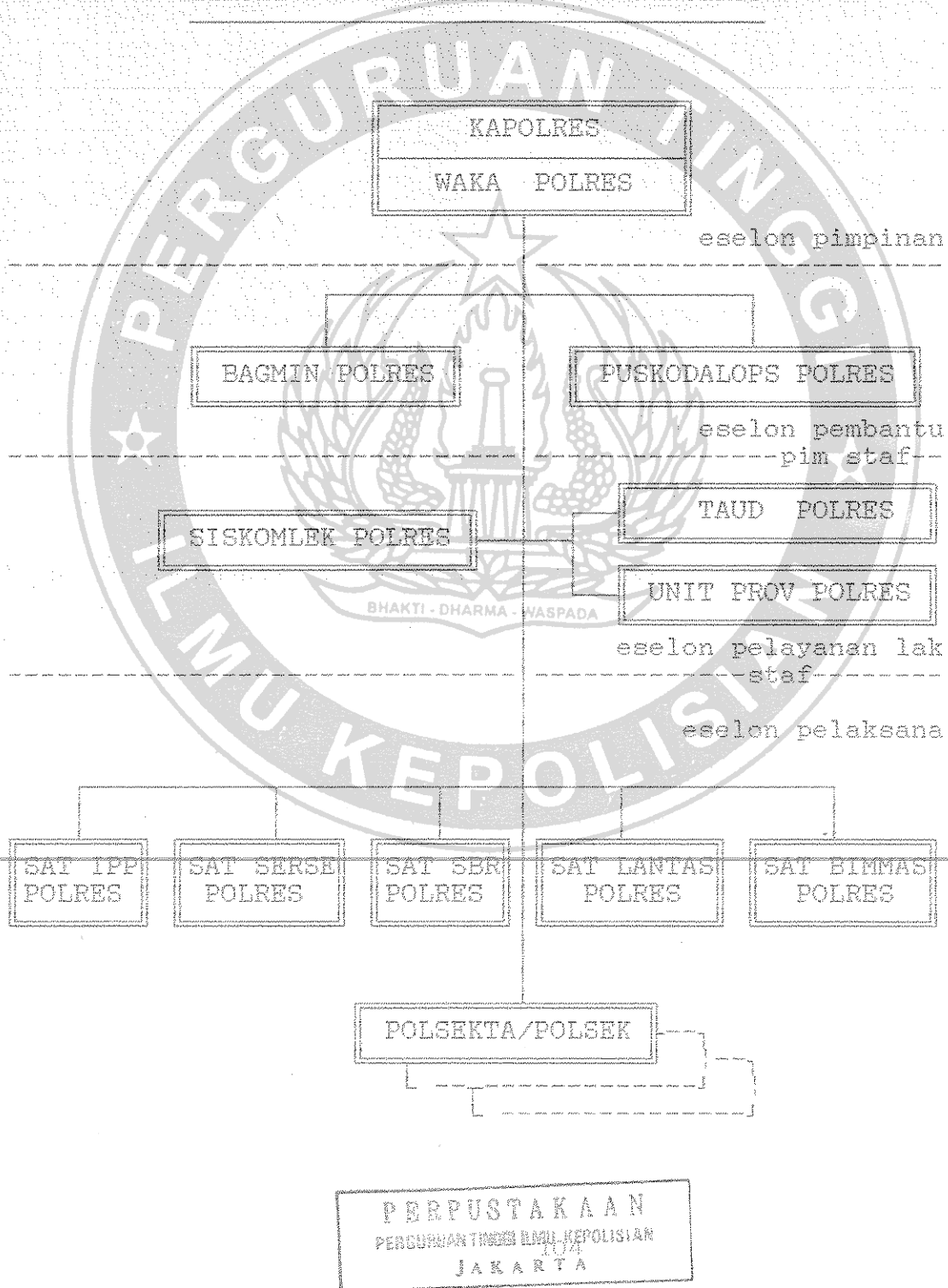


This procedure was completed at 10:33:39

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH SURABAYA
RESORT SIDOARJO

DASAR : KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. - KEP/14/XII/93
TGL. 31 DESEMBER 1993

STRUKTUR ORGANISASI POLRES SIDOARJO



POLRI WILAYAH SURABAYA
RESORT SIDOARJO
SATUAN RESERSE

DASAR : KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : KEP/14/XII/93
TGL. 31 DESEMBER 1993

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RESERSE
POLRES SIDOARJO



LAMPIRAN 5

POLRI WILAYAH SURABAYA
RESORT SIDOARJO
SEKTOR

DASAR : KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : KEP/14/XII/93
TGL. 31 DESEMBER 1993

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK/TA



** Untuk Polsek Standar tidak ada Waka.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

TENTANG

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN POLRI PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
DI POLRES SIDOARJO

IDENTITAS RESPONDEN

1. N A M A :
2. U M U R : TAHUN
3. STATUS RESPONDEN : KORBAN/SAKSI/TERSANGKA *)
4. ALAMAT TERAKHIR :

*) Lingkari.

SIDOARJO, APRIL 1995

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PELAPOR, SAKSI, TERSANGKA

A. RESPON TERHADAP ANGGOTA RESERSE.

1. Bagaimana sikap anggota reserse terhadap anda selama proses penyidikan perkara ?
 - a. Sangat ramah.
 - b. Cukup ramah.
 - c. Kurang ramah.
 - d. Tidak ramah.
2. Bagaimana penilaian anda terhadap kualitas anggota reserse yang memberikan pelayanan kepada anda ?
 - a. Berdedikasi dan menguasai tugasnya.
 - b. Cukup baik.
 - c. Kurang baik.
 - d. Tidak baik.
3. Sewaktu anda berada di kantor reserse bagaimana pelayanan terhadap anda ?
 - a. Selalu ada yang melayani.
 - b. Saya sering menunggu beberapa waktu.
 - c. Saya sering menunggu agak lama.
 - d. Sering tidak ada yang melayani.
4. Bagaimana sikap anda pada waktu berhadapan dengan anggota reserse ?
 - a. Sangat senang.
 - b. Cukup senang.
 - c. Kurang senang.
 - d. Tidak senang.

5. Bagaimana perasaan anda terhadap hasil pekerjaan anggota reserse yang mengadakan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anda ?
- a. Sangat puas.
 - b. Cukup puas.
 - c. Kurang puas.
 - d. Tidak puas.
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap lamanya waktu dan beberapa kali diadakan pemeriksaan oleh anggota reserse ?
- a. Waktu yang digunakan sesuai dengan bobot perkara.
 - b. Penggunaan waktu kurang efisien.
 - c. Pemeriksaan agak bertele-tele dan berbelit-belit.
 - d. Terkesan anggota reserse tidak punya rencana .
7. Menurut penilaian anda, bagaimana dengan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara anda ?
- a. Sangat cepat.
 - b. Waktu yang pantas.
 - c. Kurang cepat.
 - d. Terlalu lama.
8. Sepengetahuan anda, apakah pernah perbuatan merusak citra dilakukan oleh anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo ?
- a. Tidak pernah.
 - b. Pernah.
 - c. Tidak tahu.
 - d. Sering kali.

9. Selama dalam proses penyidikan, apakah pernah anda melakukan hubungan dengan anggota serse di luar jam kerja ?

- a. Sering kali.
- b. Cukup sering.
- c. Pernah beberapa kali.
- d. Tidak pernah.

10. Menurut pengamatan anda, apakah ada usaha lain dari anggota reserse untuk melakukan kegiatan diluar prosedur (yang dapat dipertanggungjawabkan) dalam rangka mempercepat tuntasnya perkara yang menyangkut anda ?

- a. Sangat sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah
- d. Tidak tahu

B. RESPON TERHADAP PROSEDUR PENYIDIKAN.

1. Bagaimana prosedur penyidikan yang dijalankan ?

- a. Sangat lancar.
- b. Cukup lancar.
- c. Agak berbelit-belit.
- d. Sangat berbelit-belit.

2. Menurut penilaian anda, apakah prosedur penyidikan yang di jalankan tidak mengganggu kecepatan penyelesaian perkara ?

- a. Tidak mengganggu.
- b. Sedikit mengganggu.
- c. Banyak mengganggu.
- d. Sangat mengganggu.

3. Menurut penilaian anda, apakah semua prosedur penyidikan dapat dijalankan oleh anggota reserse ?

- a. Dapat dijalankan. c. Sebagian kecil.
b. Sebagian besar. d. Tidak dapat dijalankan.
4. Bagaimana pendapat anda tentang tahapan-tahapan prosedur penyidikan yang dijalankan selama ini ?
- a. Sangat baik. c. Kurang baik.
b. Cukup baik. d. Tidak baik.
5. Apakah anda mengetahui tentang prosedur/proses penyidikan yang harus dilaksanakan oleh anggota reserse ?
- a. Mengetahui. e. Kurang mengetahui.
b. Cukup mengetahui. d. Tidak mengetahui.

C. RESPON TERHADAP PERALATAN FUNGSI RESERSE.

1. Apakah anda pernah mengalami dalam proses penyidikan perkara anda terhenti/tertunda beberapa waktu akibat kurangnya peralatan ?
- a. Tidak pernah. c. Sering kali.
b. Kadang-kadang. d. Selalu.
2. Bagaimana penilaian anda terhadap peralatan yang digunakan oleh anggota reserse dalam proses perkara yang pernah anda alami ?
- a. Sangat cukup. c. Kurang.
b. Cukup. d. Kurang sekali.

3. Menurut anda bagaimana kondisi peralatan reserse untuk kegiatan proses penyidikan ?

- a. Kondisi prima.
- b. Layak pakai.
- c. Kurang layak pakai.
- d. Tidak layak pakai.

4. Bagaimana penilaian anda terhadap kualitas peralatan yang digunakan dalam proses perkarang yang pernah anda alami ?

- a. Sudah canggih.
- b. Sesuai dengan kualitas perkara.
- c. Kurang memenuhi syarat.
- d. Sudah ketinggalan zaman.

D. RESPON TERHADAP KOMUNIKASI EKSTERNAL POLRI

1. Dari mana anda mengetahui bahwa Polri/anggota reserse Polres Sidoarjo dan jajarannya dapat membantu anda menyelesaikan perkara pidana ?

- a. Sudah seharusnya demikian.
- b. Media massa.
- c. Orang lain.
- d. Tidak tahu.

2. Apakah anda mengetahui bahwa Polri adalah sebagai pintu terdepan dari proses penyidikan perkara pidana umum/sipil ?

- a. Sudah mengetahui lama.
 - b. Sudah mengetahui agak lama.
 - c. Sudah mengetahui tapi masih ragu-ragu.
 - d. Belum mengetahui.
3. Bagaimana penilaian anda terhadap pelayanan penyidikan perkara pidana oleh anggota serse jajaran Polres Sidoarjo ?
- a. Selalu ada perhatian terhadap semua perkara yang terjadi
 - b. Hanya kadang-kadang ada perhatian pada perkara kecil atau yang menyangkut orang kurang penting.
 - c. Terkesan hanya ada perhatian pada perkara besar atau yang menyangkut orang penting.
 - d. Tidak tahu.
4. Bagaimana seandainya anda dimintai nasehat dari teman yang bermasalah dengan perkara pidana ?
- a. Disarankan agar melapor pada Polri.
 - b. Disarankan agar minta bantuan penasihat hukum
 - c. Disarankan agar mengurus sendiri atau minta bantuan orang lain (selain Polri dan Penasehat Hukum)
 - d. Terserah padanya saja.

5. Apakah menurut anda orang-orang yang anda kenal bila mempunyai masalah yang menyangkut perkara pidana selalu melapor kepada Polri ?
- a. Selalu.
 - b. Sebagian besar.
 - c. Hanya sebagian kecil.
 - d. Tidak tahu.
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelayanan anggota serse Polres Sidoarjo dan jajarannya ?
- a. Sangat memuaskan.
 - b. Cukup memuaskan.
 - c. Kurang memuaskan.
 - d. Tidak memuaskan.
7. Bagaimana menurut penilaian anda tentang pokok-pokok berita tentang Polri yang sering dimuat atau ditayangkan di media massa ?
- a. Lebih banyak tentang prestasi Polri dan memuji Polri.
 - b. Hanya yang sewajarnya saja.
 - c. Tidak pernah saya perhatikan.
 - d. Lebih banyak memojokkan Polri.
8. Bagaimana menurut pendapat anda tentang isi berita yang sering muncul di media massa akhir-akhir ini ?
- a. Dapat membuat masyarakat lebih simpati.
 - b. Tidak ada pengaruhnya terhadap simpati masyarakat.
 - c. Dapat mengurangi simpati masyarakat.
 - d. Dapat membuat masyarakat menjadi antipati.

E. RESPON THD EFEKTIFITAS PELAYANAN PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.

1. Bagaimana perasaan anda terhadap anggota reserse yang pernah melayani anda ?
 - a. Sangat senang.
 - b. Cukup senang.
 - c. Kurang senang.
 - d. Tidak senang.

2. Bagaimana perasaan anda terhadap hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh anggota reserse ?
 - a. Sangat puas.
 - b. Cukup puas.
 - c. Kurang puas.
 - d. Tidak puas.

3. Bagaimana menurut pengamatan anda apakah semua perkara pidana yang dilaporkan atau yang terjadi diadakan penyidikan oleh anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo ?
 - a. Semua perkara.
 - b. Sebagian besar.
 - c. Hanya perkara tertentu saja.
 - d. Tidak tahu.

4. Bagaimana menurut penilaian anda, apakah anggota reserse jajaran Polres Sidoarjo aktif memberikan pelayanan dalam penyidikan perkara pidana ?
 - a. Sangat aktif.
 - b. Cukup aktif.
 - c. Kurang aktif.
 - d. Tidak aktif.

5. Bagaimana penilaian anda, agar penyidikan perkara mendapat perhatian yang serius dari anggota reserse, apa yang harus dilaksanakan ?
- Cukup melaporkan sesuai prosedurnya.
 - Menghadap anggota yang menangani.
 - Minta bantuan atasan anggota tersebut.
 - Minta bantuan aparat lain untuk melakukan tekanan.
6. Bagaimana menurut pendapat anda tentang pengeluaran uang dan waktu yang digunakan selama berlangsungnya proses penyidikan (pemeriksaan) ?
- Tidak membebani dan menyulitkan.
 - Sedikit membebani dan menyulitkan.
 - Terlalu membebani dan menyulitkan.
 - Sangat membebani dan menyulitkan.

***** PENELITI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH *****